

2022



KANTOR GUBERNUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Gondosuli Nomor 6 Yogyakarta
Telp.: (0274) 588938; Fax: (0274) 563937
Surel: dpkp@jogjaprov.go.id
Laman: dpkp.jogjaprov.go.id

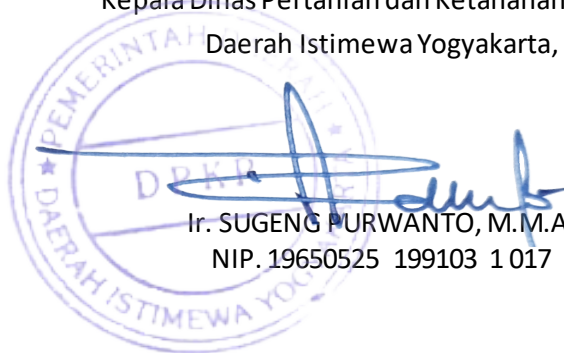
Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial, dan upaya pemulihan ekonomi. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Ir. SUGENG PURWANTO, M.M.A.
NIP. 19650525 199103 1 017

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan”:
 - Diukur dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 7.327.757 juta rupiah; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 7.814.167 juta rupiah***. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,64%.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 7.496.829 juta rupiah** terjadi peningkatan sebesar 4,23%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Terwujudnya Ketahanan Pangan”:
 - Diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) program yakni Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat serta Program Pengawasan Keamanan Pangan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebanyak 91,12 sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 96,80. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,23%.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebanyak 95,70 terjadi peningkatan sebanyak 1,15%.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Pemenuhan Pangan Masyarakat”

- Diukur dengan indikator persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program yakni Program Penanganan Kerawanan Pangan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebanyak 38,65% sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 41,39%. Dengan demikian capaian ini tidak memenuhi target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dihitung menggunakan rumus *inverse* yaitu target dikurangi selisih capaian dikurangi target dibagi target dikalikan 100%) mencapai 92,91%.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebanyak 41,94% terjadi penurunan sebanyak 1,31%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja karena semakin kecil capaiannya semakin baik.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan.
2. Ancaman krisis pangan sebagai dampak perubahan iklim dan kondisi keamanan dunia yang semakin tidak stabil.
3. Masih sulitnya regenerasi sumber daya manusia pertanian.
4. Berkurangnya jenis pupuk subsidi dan komoditas pertanian yang dapat menggunakan pupuk subsidi perlu ditindaklanjuti dengan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan petani untuk beralih mempergunakan pupuk organik bahkan dapat memproduksinya sendiri. Dengan demikian diharapkan produksi pangan tetap terjaga sekaligus dapat menghasilkan produk yang lebih menyehatkan untuk konsumen serta aman bagi kelestarian lingkungan.
5. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
6. Stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen.
7. Preferensi konsumsi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan perubahan gaya hidup.
8. Pencegahan dan pengelolaan *food waste* secara tepat.
9. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dapat memicu kerawanan pangan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
Daftar Isi	5
Daftar Tabel.....	6
Daftar Gambar	8
BAB I Pendahuluan.....	9
1.1 <i>Cascading</i> Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	9
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	12
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	14
1.4 Isu-Isu Strategis	17
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	18
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	21
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	23
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	23
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	24
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	27
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	33
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	37
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja.....	39
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	39
3.2 Capaian Kinerja Lainnya	63
3.3 Efisiensi Anggaran	68
3.4 Inovasi	69
3.5 Lintas Sektor	71
BAB 4 Penutup.....	91
LAMP I R A N	94

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	18
Tabel I.2.	Sarana-Prasarana	19
Tabel I.3.	Anggaran Tahun 2022.....	20
Tabel I.4.	Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021.....	21
Tabel II.1.	Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2017-2022.....	24
Tabel II.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	25
Tabel II.3.1.	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	27
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	31
Tabel II.4.1.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022.....	33
Tabel II.4.2.	Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022	35
Tabel III.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	39
Tabel III.2.	Capaian Kinerja Tahun 2022.....	39
Tabel III.3.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1	41
Tabel III.4.	Pengukuran Capaian Sasaran 1	42
Tabel III.5.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 1.....	44
Tabel III.6.	Perbandingan PDRB <i>Year on Year</i> (YoY).....	45
Tabel III.7.	Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2022.....	46
Tabel III.8.	Produksi Tanaman Pangan di D.I. Yogyakarta 2021-2022**	46
Tabel III.9.	Produksi Hortikultura di D.I. Yogyakarta 2021-2022**	48
Tabel III.10.	Produksi Perkebunan di D.I. Yogyakarta 2021-2022**	49
Tabel III.11.	Populasi Ternak di D.I. Yogyakarta 2021-2022**	50
Tabel III.12.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2	52
Tabel III.13.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 2.....	53
Tabel III.14.	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2021 dan 2022**	53

Tabel III.15.	Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2022.....	56
Tabel III.16.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3	58
Tabel III.17.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 3.....	59
Tabel III.18.	Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2022.....	62
Tabel III.19.	Capaian Indikator yang Mendukung <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's).....	64
Tabel III.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022.....	68
Tabel III.21.	Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.....	72

Daftar Gambar

Gambar I.1.	<i>Cascading</i> Kinerja.....	10
Gambar I.2.	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	12
Gambar I.3.	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	14
Gambar II.1.	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	37
Gambar II.2.	<i>Co Reforms Space</i>	38
Gambar III.1.	Grafik Perbandingan Skor PPH Standar dan Capaian Skor PPH DIY Tahun 2022** (Angka Sangat Sementara).....	56
Gambar III.2.	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan Tahun 2016-2022** (Angka Sangat Sementara)	60
Gambar III.3.	Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2018-2022	62
Gambar III.4.	Tingkat Ketersediaan dan Tingkat Konsumsi Energi Rata-Rata Per Kapita per Hari Tahun 2018-2022** (Angka Sangat Sementara)	66
Gambar III.5.	Tingkat Ketersediaan dan Tingkat Konsumsi Protein Rata-Rata Per Kapita per Hari Tahun 2018-2022** (Angka Sangat Sementara)	66
Gambar III.6.	Sistem Informasi Magang (Si Magang)	70
Gambar III.7.	<i>Eartag Secure QR Code</i> dan Aplikasi Identik PKH	70

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana, dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

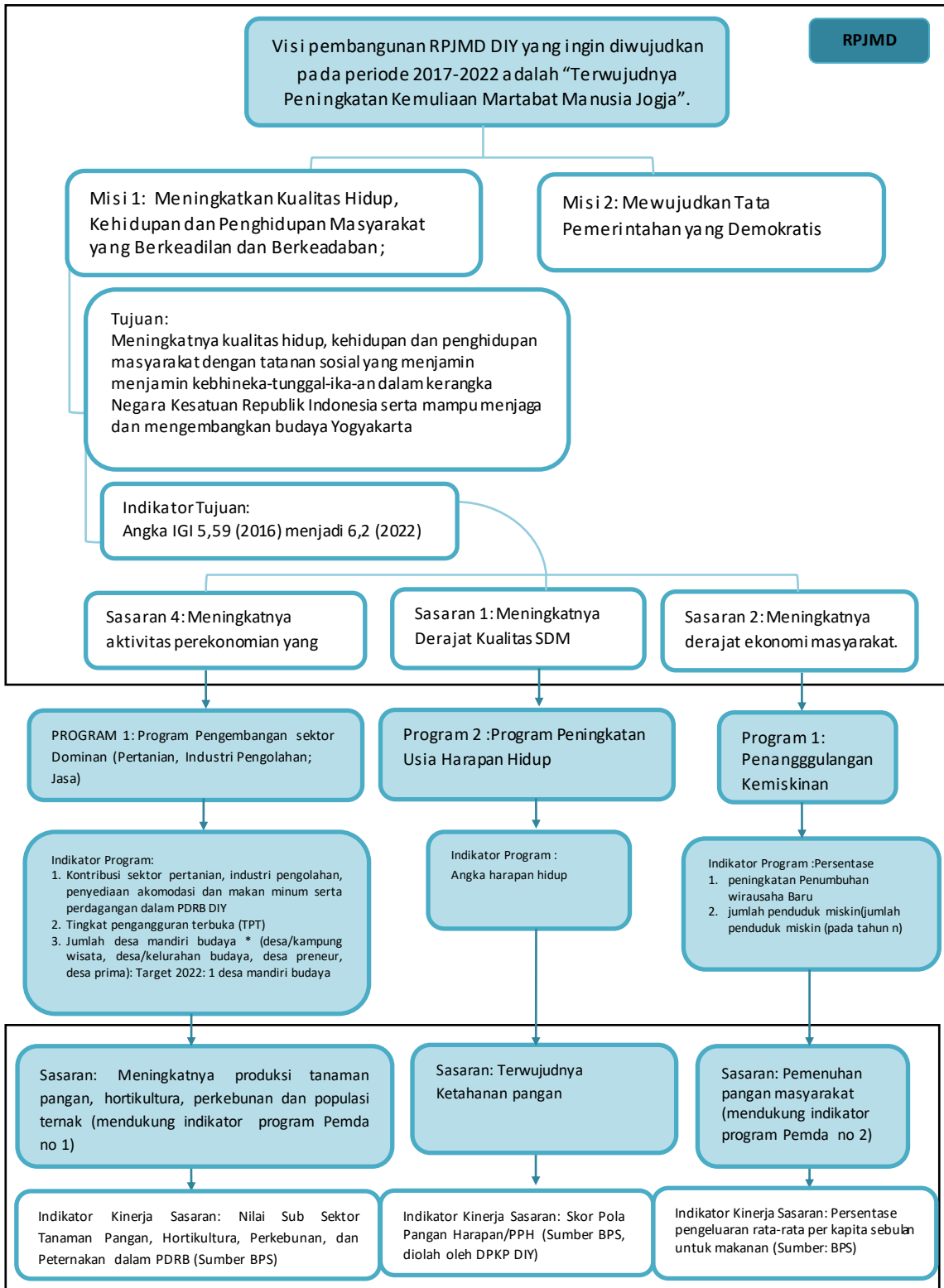
Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:

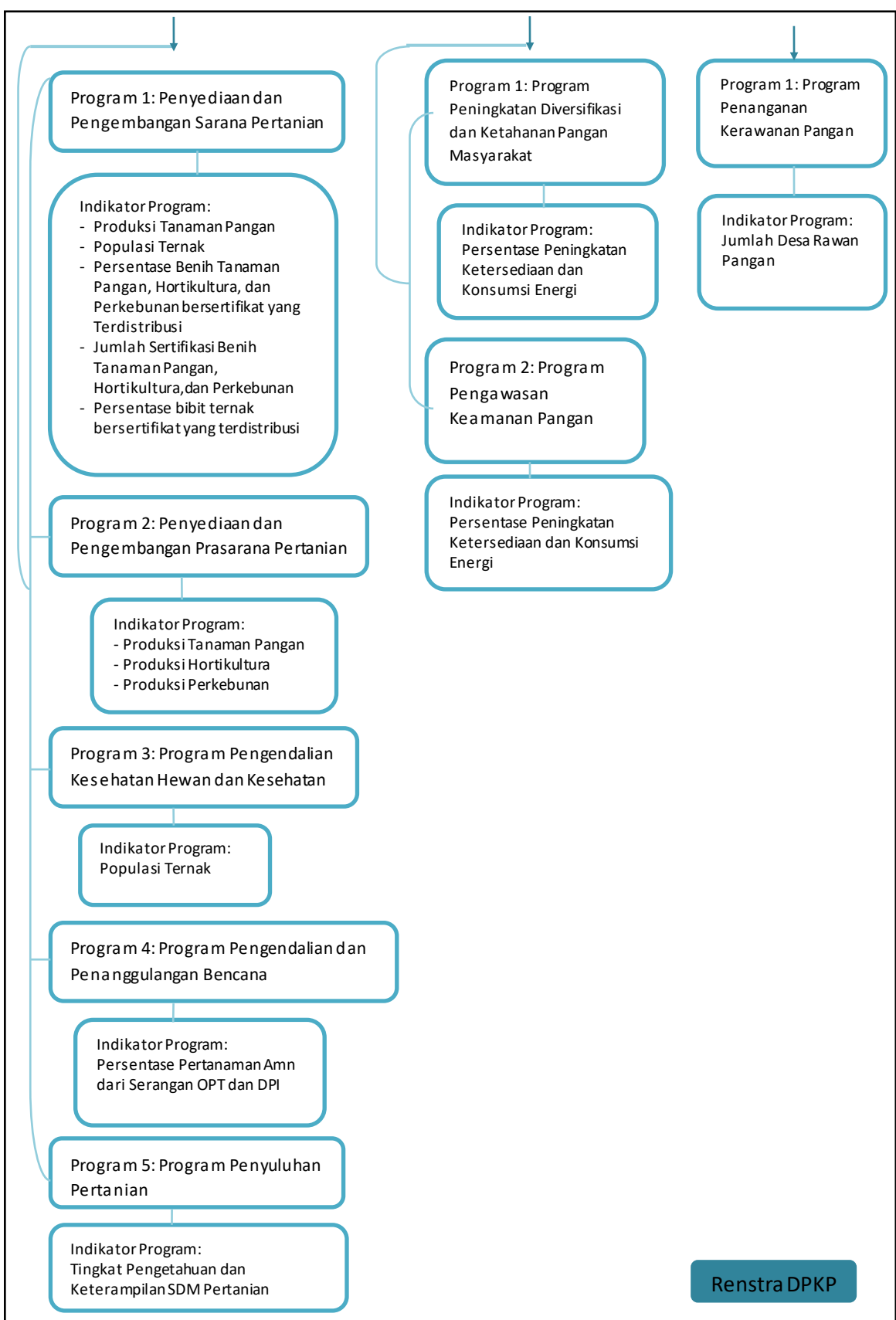
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017–2022. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja



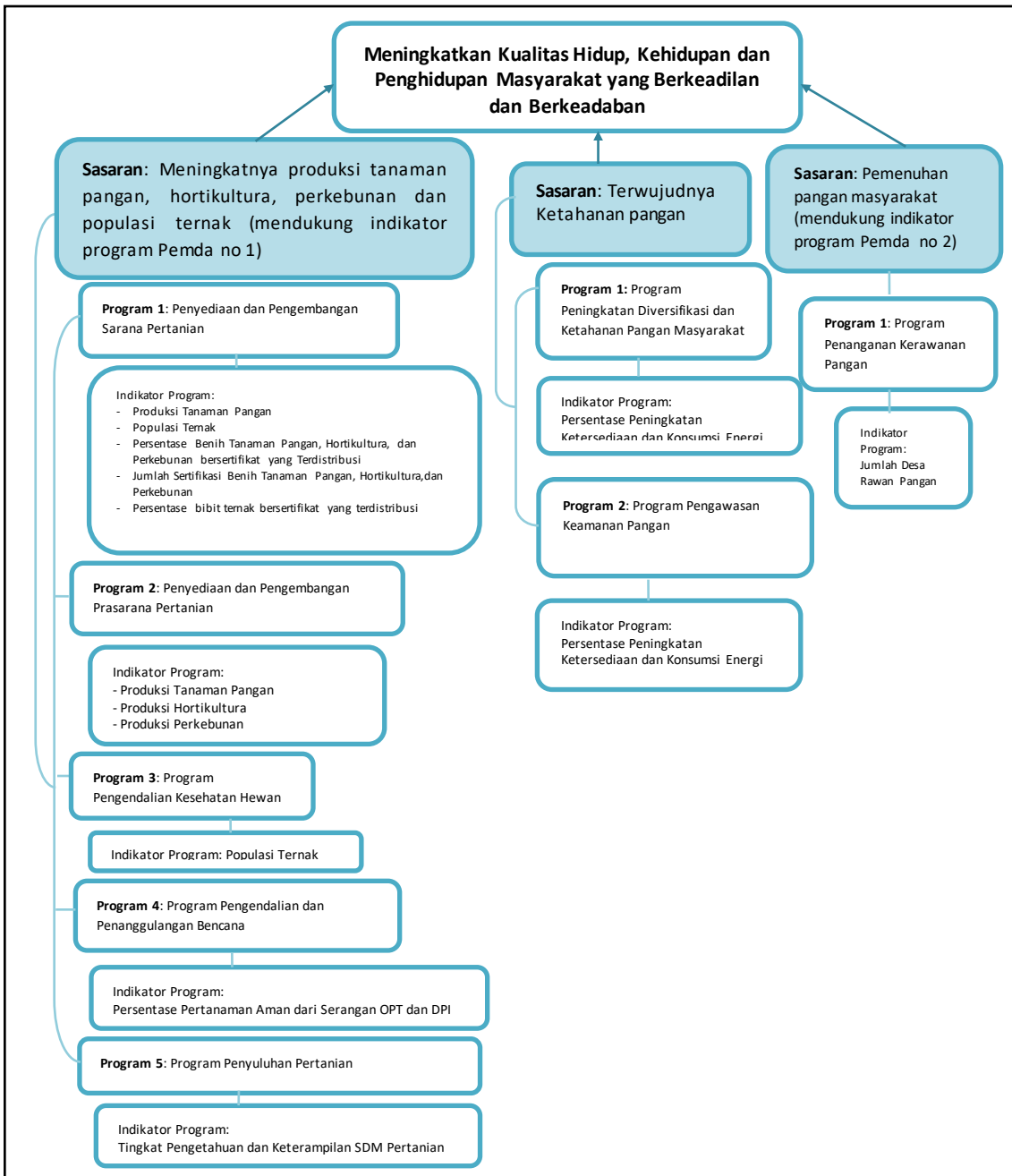


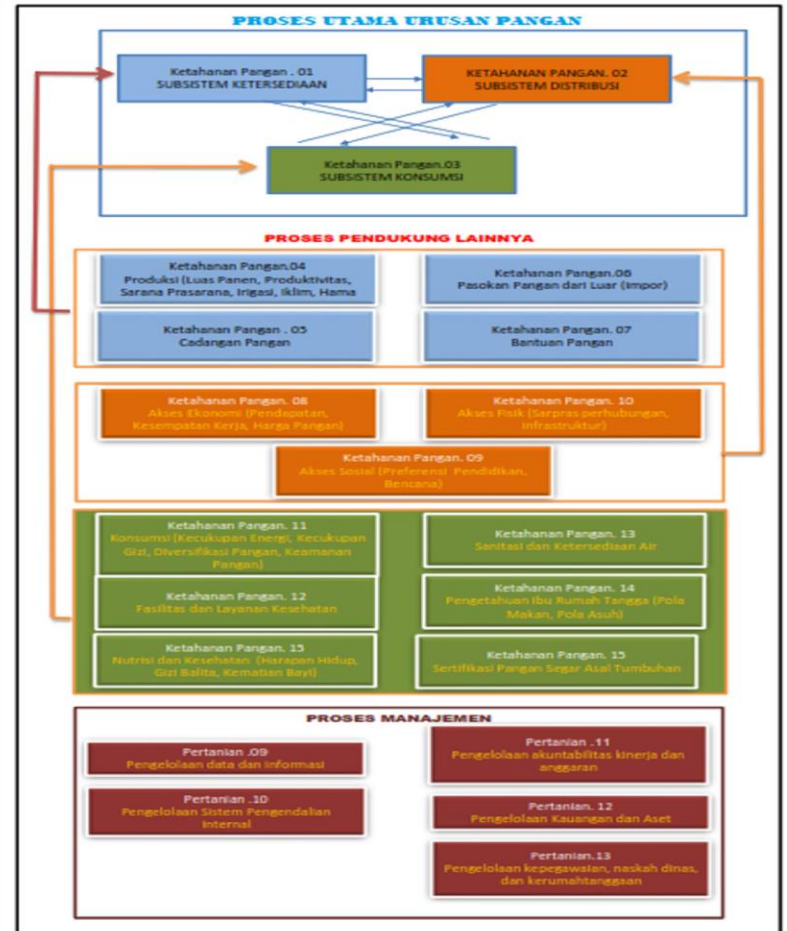
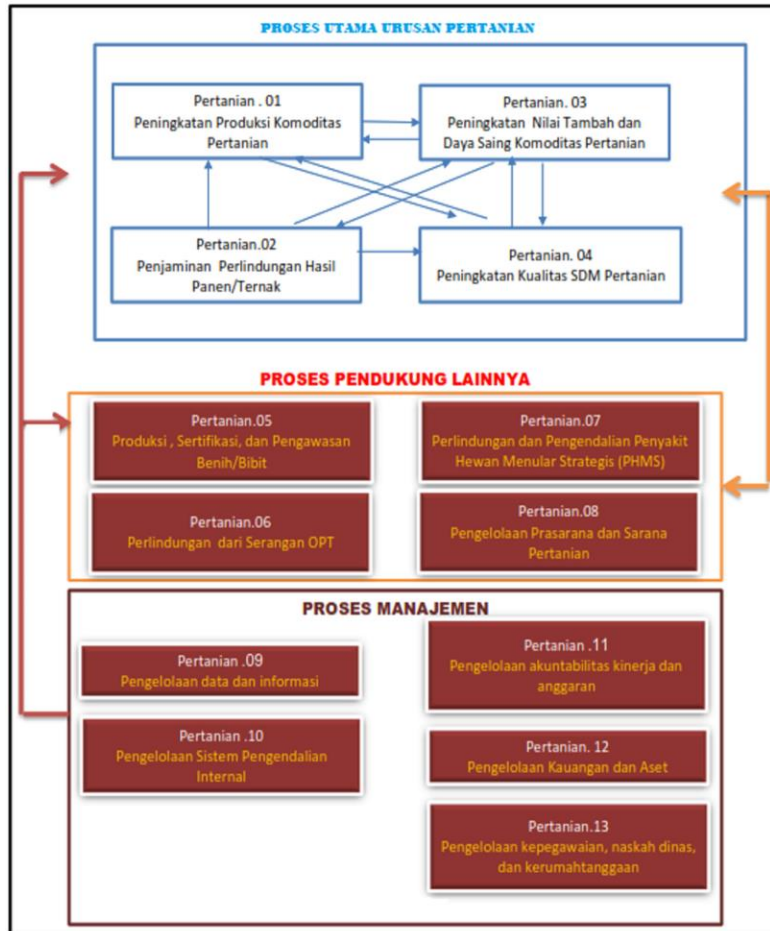
Sumber: Renstra DPKP 2017-2022

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi

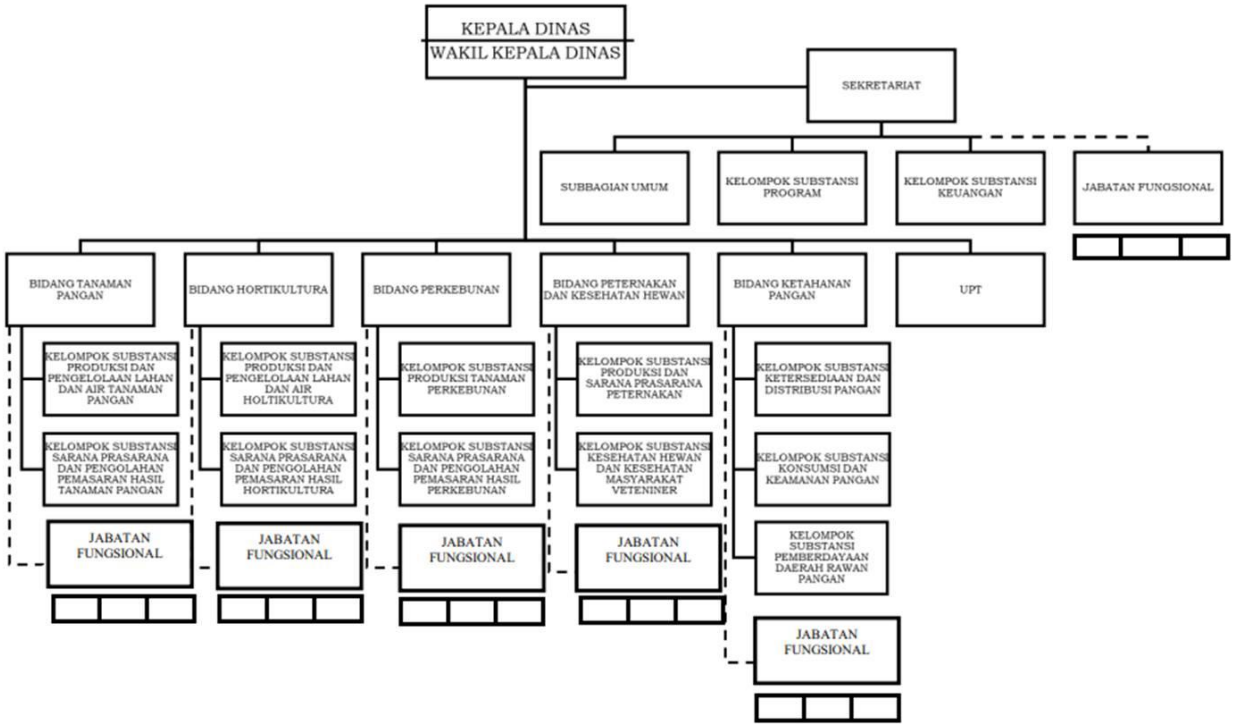
Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis, dan desain struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis, dan Struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



1.3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
4. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
5. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan ketahanan pangan;

6. pelaksanaan pengembangan pascapanen, pengolahan, mutu dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
7. fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
8. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan Kabupaten/Kota;
9. penyelenggaraan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan lintas Kabupaten/Kota;
10. pelestarian tradisi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
11. pengembangan kemitraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
12. fasilitasi, pelayanan, sertifikasi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
13. fasilitasi sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
14. penyelenggaraan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
15. penyelenggaraan perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan;
16. penyelenggaraan pengujian mutu dan keamanan pangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
17. penyelenggaraan produksi benih sumber tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
18. penyelenggaraan produksi bibit ternak dan bibit pakan ternak;
19. penyelenggaraan diagnostik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
20. pengembangan sumber daya manusia pertanian;
21. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
22. penyelenggaraan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
23. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
24. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
25. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
26. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
27. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
28. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas; 2. Wakil Kepala Dinas; 3. Sekretariat, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Umum; b. Kelompok Substansi Program; c. Kelompok Substansi Keuangan. 4. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan; dan b. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. 5. Bidang Hortikultura, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura; dan b. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura. 6. Bidang Perkebunan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok Substansi Produksi Tanaman Perkebunan; dan b. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan. 7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok Substansi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan; dan b. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 8. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; b. Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan c. Kelompok Substansi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 10. Jabatan fungsional. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dibawah Kelompok Substansi Program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun program anggaran dan pelaporan 2) Pengelola sistem dan jaringan b. Dibawah Kelompok Substansi Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengadministrasian keuangan 3) Pengelola gaji 4) Pengelola akuntansi 5) Verifikator data laporan keuangan c. Dibawah kasubbag umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadminstrasian umum 2) Pengadministrasaaian persuratan 3) Pranata kearsipan 4) Pengadministrasi kepegawaian 5) Teknisi sarana dan prasarana 6) Pengelola barang milik negara 7) pengemudi d. Dibawah Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola budidaya dan pengembangan TP e. Dibawah Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis pemasaran hasil pertanian f. Dibawah Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola lahan pertanian g. Dibawah Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis pemasaran hasil pertanian h. Dibawah Kelompok Substansi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengawas mutu hasil perkebunan i. Dibawah Kelompok Substansi Sarana Prasarana: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyuluh perkebunan j. Dibawah Kelompok Substansi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola budidaya pengembangan ternak dan hewan lainnya k. Dibawah Kelompok Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawas hygiene, sanitasi usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner. l. Dibawah Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola ketahanan pangan m. Dibawah Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola pola pangan harapan n. Dibawah Kelompok Substansi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola ketersediaan dan kerawanan pangan

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2017-2022 antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
2. Penanganan degradasi lahan dan kerusakan lingkungan;
3. Upaya peningkatan produksi masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan, risiko bencana alam, serangan hama dan penyakit, serta perubahan iklim;
4. Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
5. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
6. Kurangnya pemenuhan standar pasca panen-pengolahan-pemasaran hasil pertanian dan standar mutu produk yang mengakibatkan rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
7. Lemahnya akses petani terhadap permodalan;
8. Harga produk pertanian yang fluktuatif akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian;
9. Pengelolaan usaha tani yang berorientasi pada pasar regional dan internasional yang belum maksimal;
10. Kurangnya peran generasi muda dan kelembagaan pertanian terutama Gapoktan, Kelompok Tani, UPJA, penangkar dan produsen benih, kelompok pengolahan hasil, serta P3A/GP3A/IP3A;
11. Kurangnya jalinan kemitraan agribisnis antara kelembagaan petani dengan mitra pemasaran;
12. Kurangnya daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, penerapan pola tanam yang tepat;

13. Fasilitasi prasarana sarana pertanian bagi petani yang kesulitan memperoleh *input* produksi akibat pandemi Covid-19;
14. Belum maksimalnya perlindungan bagi petani saat terjadi gagal panen (Asuransi Usaha Tani);
15. Kondisi kemiskinan yang dapat berlanjut pada kerawanan pangan pangan;
16. Masih rendahnya diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan berkelanjutan mulai dari tingkat Rumah Tangga;
17. Minimnya cadangan pangan perlu terus ditingkatkan;
18. Kondisi dan beban ganda keamanan pangan;
19. Belum maksimalnya pengembangan agrowisata teh, kopi, dan kakao sebagai usaha pengintegrasian sektor perkebunan dengan sektor pariwisata untuk mendapatkan nilai tambah pada usaha perkebunan;
20. Digitalisasi pertanian secara menyeluruh dan pengelolaan sistem data pertanian yang terintegrasi belum sepenuhnya diterapkan.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				JenisKelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	2	2				2	2				2	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	10	10				9	7	2			7	2
	2. Pengawas	26	26				13	7	6			10	3
	3. Pelaksana	171		96	74	1	140	6	53	13	68	80	60
C.	Jabatan Fungsional	201					118	26	78	4	10	58	60
	Jumlah	410	38	96	74	1	282	48	139	17	78	157	125

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Berdasarkan data di atas, jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sejumlah 282 orang dengan jumlah laki laki sebanyak 157 orang dan perempuan sebanyak 125 orang. Jumlah pegawai laki laki

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan. Tingkat pendidikan SDM Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 139 orang (49,29%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 48 orang (17,02%), D3 sebanyak 17 orang (6,03%), SLTA sebanyak 78 orang (27,66%). Jumlah formasi sebanyak 410 orang dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 282 orang. Hal ini menunjukkan masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 128 orang. Formasi pegawai yang ada saat ini terdiri dari 2 orang jabatan pimpinan tinggi, 9 orang jabatan administrator, 13 orang jabatan pengawas, 140 orang jabatan pelaksana, dan 118 orang jabatan fungsional. Dalam manajemen SDM aparatur, DPKP DIY sudah menerapkan sistem merit dan kesetaraan *gender*, walaupun demikian sampai saat ini jumlah pejabat struktural laki-laki masih lebih banyak dibanding perempuan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Tanah	46	126.780.807.899,00
2	Alat Besar	70	2.471.180.879,99
3	Alat Angkutan	322	8.200.850.390,00
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	58	328.350.306,00
5	Alat Pertanian	428	9.141.194.149,97
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.267	8.311.153.560,90
7	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	279	1.589.000.850,00
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	31	149.690.115,00
9	Alat Laboratorium	440	11.298.370.338,99
10	Alat Persenjataan	10	30.900.000,00
11	Komputer	514	3.059.467.612,98
12	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	3	38.499.000,00
13	Rambu – Rambu	4	49.548.232,00
14	Bangunan Gedung	160	107.245.465.515,48
15	Monumen	1	47.750.000,00
16	Bangunan Menara	1	14.387.000,00
17	Jalan Dan Jembatan	10	2.574.642.790,00

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
18	Bangunan Air	25	4.054.091.979,90
19	Instalasi	27	734.555.681,00
20	Jaringan	22	495.398.969,10
21	Bahan Perpustakaan	509	27.514.080,00
22	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	14	280.000,00
23	Hewan	133	1.594.982.599,98
24	Biota Perairan	40	2.400.000,00
25	Tanaman	210	176.000.000,20
26	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	63.369.625,00
27	Aset Tidak Berwujud	27	1.206.325.780,00
28	Aset Lain-Lain	75	1.526.260.812,00
Total		6.728	291.212.438.167,49

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022

Adapun total sarana prasarana yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sejumlah 6.728 tersedia dalam kondisi baik dengan nilai aset sebesar Rp. 291.212.438.167,49. Ketersediaan sarana dan prasarana sampai dengan saat ini cukup memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.223.780.400	1.598.625.820	374.845.420
4 1 02	Retribusi Daerah	1.103.068.000	1.449.910.420	346.842.420
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	120.712.400	148.715.400	28.003.000
Jumlah Pendapatan		1.223.780.400	1.598.625.820	374.845.420
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	102.833.461.683	100.056.973.620	-2.776.488.063
5 1 01	Belanja Pegawai	52.169.111.840	48.800.961.213	-3.368.150.627
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.293.161.843	21.860.422.393	567.260.550
5 1 05	Belanja Hibah	29.371.188.000	29.395.590.014	24.402.014
5 2	BELANJA MODAL	259.067.000	4.310.406.744	4.051.339.744
5 2 02	Belanja Modal Peralatan	224.067.000	3.532.377.744	3.308.310.744

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
			dan Mesin			
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.000.000	243.500.000	208.500.000
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		444.529.000	444.529.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		90.000.000	90.000.000
Jumlah Belanja				103.092.528.683	104.367.380.364	1.274.851.681
Total Surplus/(Defisit)				(101.868.748.283)	(102.768.754.544)	(900.006.261)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
			Pembiayaan Neto	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Keistimewaan (Danais), Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dan Dana Insentif Daerah (DID) terlihat pada Tabel I.3 di atas. Anggaran total untuk tahun 2022 semula Rp. 103.092.528.683,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 104.367.380.364,00 atau bertambah Rp. 1.274.851.681,00. Perubahan anggaran Tahun 2022 merupakan dukungan Pemerintah Daerah terhadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial, dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY beserta seluruh jajarannya agar dapat mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik, namun demikian masih ada tindakan perbaikan yaitu	Kepala Dinas beserta seluruh karyawan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY berkomitmen untuk meningkatkan capaian sasaran/kinerja organisasi dengan cara mempersiapkan dokumen perencanaan dengan lebih baik,

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	<p>pada pencapaian sasaran/kinerja organisasi terutama pada kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>).</p>	<p>memonitor pelaksanaan kegiatan, dan mengadakan evaluasi atas pencapaian <i>output</i>, <i>outcome</i>, dan kinerja utama secara periodik. Selain itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY akan meningkatkan jejaring kerjasama dengan para pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan pangan dan pertanian di DIY.</p>

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial, dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017-2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017-2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY mempunyai misi **“Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban”**. Terkait hal tersebut tujuan

jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY selama lima tahun adalah:

“Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”.

Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1. Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultur, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	Juta Rupiah	6.903.079	7.041.831	7.112.249	7.183.372	7.255.205	7.327.757	7.327.757
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	88,5	89,92	90,22	90,52	90,82	91,12	91,12
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	%	40,52	N/A	40,29	39,74	39,19	38,65	38,65

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengamankan produksi komoditas utama dan unggulan daerah; 2. Meningkatkan mutu produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan; 3. Memperkuat kelembagaan petani dan memberdayakan petani dalam melakukan agribisnis produk unggul pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM petani; 4. Meningkatkan penggunaan aplikasi teknologi pertanian oleh masyarakat; 5. Mengembangkan potensi ternak lokal; 6. Mengembangkan kawasan berbasis komoditas unggulan; 7. Membangun sentra-sentra pembibitan ternak lokal; 8. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; 9. Mengembangkan teknologi produksi pertanian domestik melalui penerapan <i>Good Agriculture Practices (GAP)/Standard Operating Procedure (SOP)</i>; 10. Mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), mengendalikan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian; 11. Menyediakan sarana prasarana (pupuk, benih, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani; 2. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan; 3. Pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana); 4. Pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani; 5. Pengembangan sentra-sentra pembibitan ternak lokal; 6. Pendampingan dan pengawalan kelompok. 7. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pemantapan kelembagaan penyuluhan, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan.

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>bahan pengendalian OPT, alsintan, sumber daya air, dan permodalan);</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui penerapan <i>Good Handling Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Good Distribution Practices</i> (GDP) dan <i>Good Marketing/Retail Practices</i> (GRP); 13. Mempromosikan dan memasarkan produk pertanian di pasar domestik maupun internasional; 14. Melindungi petani melalui regulasi subsidi harga produk; 15. Melindungi petani saat terjadi gagal panen/produksi (Asuransi Usaha Tani) 16. Memfasilitasi prasarana dan sarana penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH); 17. Menumbuhkembangkan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wira usahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis pertanian bagi generasi muda; 18. Mengembangkan kemitraan antar poktan/gapoktan/lembaga petani dengan pihak ketiga dalam membangun rantai pasokan (<i>supply chain management</i>). 	
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, konsumsi, dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanjapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sektor 2. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah) 3. Peningkatan diversifikasi/pengalokasian pangan berbasis pangan lokal 4. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Segar Asal Tumbuhan 5. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilitas harga pangan strategis, dan pemantauan distribusi, harga, akses pangan. 6. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Perbenihan
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan	1. Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan 2. Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat 3. Pemenuhan kecukupan pangan masyarakat

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatkan produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunandan peternakan	1.1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	29.143.830.000	30.196.870.750	1.053.040.750
	1.1.1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.165.913.000	5.325.283.000	159.370.000
	1.1.1.1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5.165.913.000	5.325.283.000	159.370.000
	1.1.2. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	19.733.278.000	19.736.028.000	2.750.000
	1.1.2.1. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	19.733.278.000	19.736.028.000	2.750.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.3. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.244.639.000	1.764.545.800	519.906.800
	1.1.3.1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	59.000.000	309.921.700	250.921.700
	1.1.3.2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	493.578.000	736.104.000	242.526.000
	1.1.3.3. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	615.759.500	635.646.500	19.887.000
	1.1.3.4. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	76.301.500	82.873.600	6.572.100
	1.1.4. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.000.000.000	3.371.013.950	371.013.950
	1.1.4.1. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.000.000.000	3.371.013.950	371.013.950
	1.2. PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.064.911.250	5.258.126.064	193.214.814
	1.2.1. Penataan Prasarana Pertanian	5.064.911.250	5.258.126.064	193.214.814
	1.2.1.1. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.482.249.250	3.675.464.064	193.214.814
	1.2.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1.582.662.000	1.582.662.000	0
	1.3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.207.762.000	3.137.700.094	1.929.938.094
	1.3.1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota	83.603.000	83.603.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
	1.3.1.1. Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	83.603.000	83.603.000	0
	1.3.2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	586.916.000	604.866.000	17.950.000
	1.3.2.1. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	26.705.000	44.655.000	17.950.000
	1.3.2.2. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	560.211.000	560.211.000	0
	1.3.3. Kesejahteraan Hewan	37.243.000	37.243.000	0
	1.3.3.1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	37.243.000	37.243.000	0
	1.3.4. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	500.000.000	2.411.988.094	1.911.988.094
	1.3.4.1. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500.000.000	2.411.988.094	1.911.988.094
	1.4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	60.000.000	65.500.000	5.500.000
	1.4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	60.000.000	65.500.000	5.500.000
	1.4.1.1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	60.000.000	65.500.000	5.500.000
	1.5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.461.334.000	3.556.834.000	95.500.000
	1.5.1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	195.950.000	198.700.000	2.750.000
	1.5.1.1. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	195.950.000	198.700.000	2.750.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.5.2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.265.384.000	3.358.134.000	92.750.000
	1.5.2.1. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.054.797.000	3.144.797.000	90.000.000
	1.5.2.2. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	210.587.000	213.337.000	2.750.000
2. Terwujudnya ketahanan pangan	2.1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.092.107.500	1.431.755.500	339.648.000
	2.1.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	315.353.500	655.001.500	339.648.000
	2.1.1.1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	182.558.500	182.558.500	0
	2.1.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	132.795.000	472.443.000	339.648.000
	2.1.2. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	776.754.000	776.754.000	0
	2.1.2.1. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	776.754.000	776.754.000	0
	2.2. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	139.577.250	142.327.250	2.750.000
	2.2.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	139.577.250	142.327.250	2.750.000
	2.2.1.1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	40.163.500	40.163.500	0
	2.2.1.2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60.595.000	60.595.000	0
2.2.1.3. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	38.818.750	41.568.750	2.750.000	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
3. Pemenuhan Pangan Masyarakat	3.1. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	93.142.000	95.892.000	2.750.000
	3.1.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	37.635.000	37.635.000	0
	3.1.1.1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	37.635.000	37.635.000	0
	3.1.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	55.507.000	58.257.000	2.750.000
	3.1.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	55.507.000	58.257.000	2.750.000
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		40.262.664.000	43.885.005.658	3.622.341.658

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	56.910.125.683	54.728.526.506	-2.181.599.177
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.663.000	92.663.000	0
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.304.000	46.304.000	0
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.723.000	18.723.000	0
	1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.636.000	27.636.000	0
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.094.846.840	48.726.696.213	-3.368.150.627
	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.926.531.840	48.558.381.213	-3.368.150.627
	2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155.460.000	155.460.000	0
	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.855.000	12.855.000	0
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	87.120.000	87.120.000	0
3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	87.120.000	87.120.000	0	

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.214.000	32.214.000	0
4.1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.214.000	32.214.000	0
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.035.000	199.138.000	2.103.000
5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.708.000	22.708.000	0
5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	2.103.000	2.103.000
5.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.465.000	13.465.000	0
5.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.961.000	62.961.000	0
5.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000	0
5.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.101.000	93.101.000	0
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	856.000.000	856.000.000
6.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	856.000.000	856.000.000
7.	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	3.405.900.643	3.281.319.093	-124.581.550
7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.882.000	79.882.000	0
7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	969.421.443	844.839.893	-124.581.550
7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.356.597.200	2.356.597.200	0
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.346.200	1.453.376.200	453.030.000
8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.216.000	37.216.000	0
8.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	577.502.200	577.502.200	0
8.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.030.000	35.030.000	0
8.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	312.828.000	765.858.000	453.030.000

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.770.000	37.770.000	0
Total Anggaran Pendukung		56.910.125.683	54.728.526.506	-2.181.599.177

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY adalah sebagai berikut:

Tabel II.4.1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya produksitanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Sumber BPS)	Juta rupiah	7.327.757	Triwulan I	7.327.757
					Triwulan II	7.327.757
					Triwulan III	7.327.757
					Triwulan IV	7.327.757 *)
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,12	Triwulan I	91,12
					Triwulan II	91,12
					Triwulan III	91,12
					Triwulan IV	91,12
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	Persen	38,65	Triwulan I	40,83
					Triwulan II	40,83
					Triwulan III	40,83
					Triwulan IV	38,65 *)

Keterangan Tambahan:

1. *) Data capaian kinerja bersumber dari BPS, Angka Sementara baru dirilis bulan Februari atau Maret tahun berikutnya sehingga capaian akhir tahun menggunakan Angka Prediksi OPD.
2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan:
 - a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman Rp. 5.249.000.000,00.
 - b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Rp. 670.739.000,00.
3. Mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp. 300.000.000,00 melalui:
 - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp. 157.792.000,00.
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Rp. 142.208.000,00.
4. Pengelolaan dana APBN Dekonsentrasi sebesar Rp. 6.629.807.000,00 melalui program:
 - a. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - c. Program Dukungan Manajemen
5. Pengelolaan dana APBN Tugas Pembantuan sebesar Rp. 37.047.266.000,00 melalui program:
 - a. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - c. Program Dukungan Manajemen

Pada tahun 2022, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melaksanakan revaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Revaluasi dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Revaluasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (<i>Sumber BPS</i>)	Juta rupiah	7.327.757	Triwulan I	7.327.757
					Triwulan II	7.327.757
					Triwulan III	7.327.757
					Triwulan IV	7.327.757 *)
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,12	Triwulan I	91,12
					Triwulan II	91,12
					Triwulan III	91,12
					Triwulan IV	91,12
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	Persen	38,65	Triwulan I	40,83
					Triwulan II	40,83
					Triwulan III	40,83
					Triwulan IV	38,65 *)

Keterangan Tambahan:

1. *) Data capaian kinerja bersumber dari BPS, Angka Sementara baru dirilis bulan Februari atau Maret tahun berikutnya sehingga capaian akhir tahun menggunakan Angka Prediksi OPD.
2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan:
 - a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman Rp. 4.894.144.200,00.
 - b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Rp. 859.704.000,00.
3. Mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp. 633.334.814,00 melalui:
 - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp. 331.756.814,00.
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, Sub Kegiatan Pengawasan

Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Rp. 301.578.000,00.

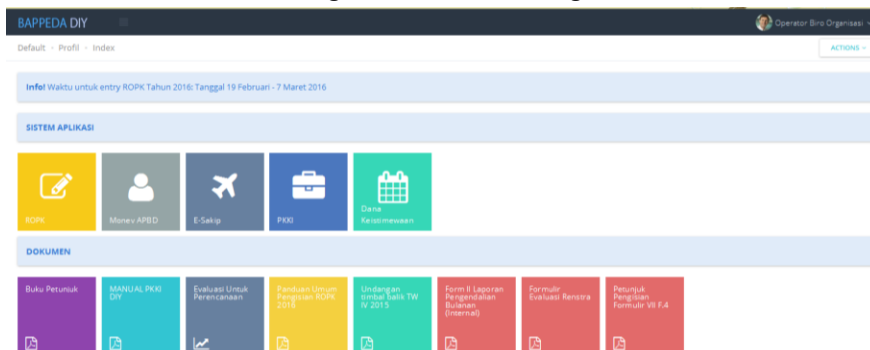
4. Mengelola Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 2.702.944.177,00 melalui:
 - a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Rp. 167.298.000,00.
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Rp. 248.171.700,00.
 - c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura Rp. 233.756.000,00.
 - d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan Rp. 14.757.000,00.
 - e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Rp. 6.515.100,00.
 - f. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Kewenangan Provinsi Rp. 368.263.950,00.
 - g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 336.030.000,00.
 - h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, Sub Kegiatan

- Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp. 1.312.952.427,00.
- i. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Rp. 15.200.000,00.
5. Mengelola anggaran APBN Dekonsentrasi sebesar Rp. 11.352.661.000,00 melalui program:
 - a. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.
 - c. Program Dukungan Manajemen.
 - d. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
 6. Mengelola anggaran APBN Tugas Pembantuan sebesar Rp. 61.530.979.000,00 melalui program:
 - a. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.
 - c. Program Dukungan Manajemen.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi <https://sungguh.jogjaprov.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan OPD.

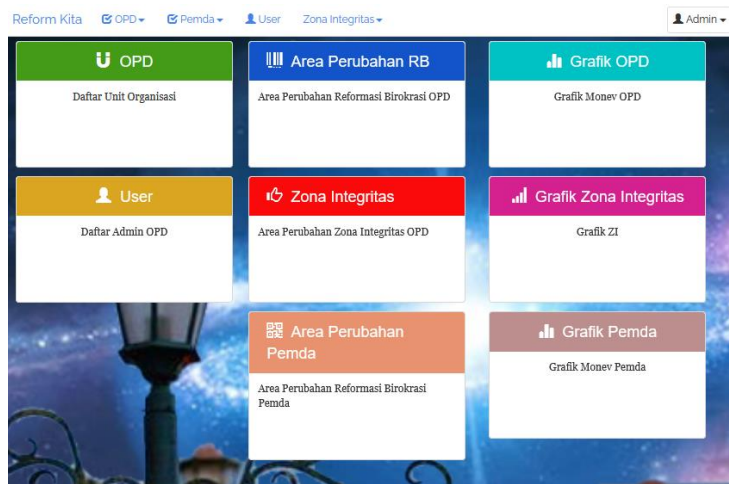
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <https://sungguh.jogjaprov.go.id/>

Instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi *Co reforms space* yang mengintegrasikan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Gambar II.2. Co Reforms Space



Sumber: <https://biroorganisasi.jogjaprov.go.id/coreformspace/menu.php/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2022
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi
4. Lintas Sektor

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Indikator: Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB	Juta Rupiah	6.903.079	7.496.829* *	7.327.757	7.814.167** *	106,64	Sangat Baik	7.327.757

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Juta rupiah) (Sumber BPS) Meta indikator: Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun n (ADHK)								
2	Terwujudnya ketahanan pangan	Indikator: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Meta indikator: % AKG X Bobot	Skor	88,5	95,70	91,12	96,80	106,23	Sangat Baik	91,12
3	Pemenuhan pangan masyarakat	Indikator: Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan Meta indikator: Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dibagi pengeluaran rata-rata perkapita sebulan total dikali 100% (Data BPS)	Persen	40,52	41,94	38,65	41,39***	92,91	Sangat Baik	38,65

**) Angka Sangat Sementara

***) Angka Prediksi

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2023

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan

Kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan diukur dengan indikator Nilai Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan dalam PDRB (Sumber BPS). Penjelasan hubungan sasaran, indikator, dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan, dan peternakan.	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Sumber BPS)	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, dan peternakan dalam PDRB tahun n (ADHK)

Sasaran strategis 1 **“Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan”** didukung oleh 9 Program sesuai RPJMD DIY atau 5 Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, dengan indikator program yakni: (1) Produksi Tanaman Pangan (ton), (2) Produksi Hortikultura (ton), (3) Populasi Ternak (animal unit), (4) Produksi Perkebunan (ton), (5) Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Bersertifikat yang Terdistribusi (%), (6) Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (ha), (7) Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT dan DPI (%), (8) Persentase Bibit Ternak Bersertifikat yang Terdistribusi (%), Dan (9) Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan SDM Pertanian (nilai/skor).

Indikator sasaran strategis 1 **“Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Sumber BPS)”**, sumber data diolah dari hasil perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DIY (BPS Prov. DIY) dengan memperhitungkan sumbangan sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada tahun 2022 berdasarkan metode hitung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Hasil penghitungan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB tahun 2022 (ADHK) diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1

No.	Sub Kategori	PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunan Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020*	2021**	2022***
1.	Pertanian (tanpa jasa pertanian dan perburuan)	6.905.892	7.006.249	7.464.189	7.496.829	7.814.167
a.	Tanaman Pangan	2.950.946	2.940.429	3.233.401	3.073.421	3.314.770
b.	Tanaman Hortikultura	2.021.184	2.084.243	2.209.320	2.304.182	2.323.933
c.	Tanaman Perkebunan	218.349	232.059	251.243	218.252	248.491
d.	Peternakan	1.715.413	1.749.517	1.770.224	1.900.975	1.926.974
PDRB DIY		98.024.014	104.485.459	101.683.520	107.308.555	112.898.323
Sektor Pertanian terhadap PDRB DIY (%)		7,05	6,71	7,34	6,99	6,92

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

***) Angka Prediksi

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2023

Capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB tahun 2022 berdasarkan harga konstan berdasarkan perhitungan proyeksi data BPS Provinsi DIY yaitu sebesar 7.814.167 juta rupiah atau tercapai sebesar 106,64% dari target tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021, capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB tahun 2022 meningkat sebesar 4,23%. Kontribusi sektor pertanian (tanpa jasa pertanian dan perburuan) terhadap capaian total PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan harga konstan (ADHK) sebesar 6,92%, sedangkan jika dihitung atas dasar harga yang berlaku (ADHB) kontribusinya sebesar 8,64%.

Sebagai data dukung, capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk produksi tanaman pangan tahun 2022 sebesar 2.328.120 ton atau terealisasi 100,63% dari target 2.313.500 ton, produksi hortikultura tercapai

387.820 ton atau terealisasi 96,29% dari target 402.750 ton, produksi perkebunan tercapai 64.072,01 ton atau terealisasi 92,47% dari target 69.290 ton, dan populasi ternak tercapai 625.021 *Animal Unit* atau terealisasi 99,39% dari target 628.870 *Animal Unit*.

Kenaikan nilai PDRB sub sektor tanaman pangan pada tahun 2022 sebesar 7,85% dipengaruhi oleh peningkatan produksi. Subsektor perkebunan mengalami penurunan produksi 7,39% dibanding tahun sebelumnya, namun nilai PDRB mengalami peningkatan sebesar 13,85%, karena peningkatan produksi terjadi pada komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti komoditas tembakau, kakao, dan cengkeh. Nilai PDRB sub sektor hortikultura mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 0,86%. Beberapa komoditas strategis seperti bawang merah, cabai besar, cabai rawit, dan melon mengalami penurunan produksi namun harganya masih cukup stabil bahkan adakalanya memiliki harga yang tinggi sehingga tetap dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB. Populasi ternak turun 0,84% namun mengalami peningkatan nilai PDRB sebesar 1,37% yang dipengaruhi oleh peningkatan populasi kambing dan unggas berupa ayam buras, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging. Peningkatan populasi ternak ini sejalan dengan peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan nilai PDRB sub sektor peternakan.

Ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dan kondisi keamanan dunia yang tidak stabil perlu diantisipasi dengan tepat agar pertanian dapat bertahan dan mampu menyediakan pangan bagi seluruh penduduk bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan positif nilai PDRB sektor pertanian pada masa peralihan dari pandemi ke endemi Covid-19 ini masih memberikan harapan bahwa sektor ini dapat menjadi salah satu andalan untuk kebangkitan ekonomi di DIY.

Capaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indikator kinerja nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan berdasarkan Permendagri Nomor 89 Tahun 2017 termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Kinerja sasaran meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Juta Rupiah) pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Juta Rupiah) (Sumber BPS)	7.496.829**	7.327.757	7.814.167***	106,64 [[7.814.167/ 7.327.757] x 100%]	7.327.757	106,64 [[7.814.167/ 7.327.757] x 100%]

**) Angka Sangat Sementara

***) Angka Prediksi

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: **“Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan”** adalah sebagai berikut:

- Indikator kinerja Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) tercapai 7.814.167 (juta rupiah), dengan persentase capaian 106,64% dari target 2022.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat peningkatan sebesar 4,23%.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 106,64%.
- Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 didukung oleh:

Kontribusi produksi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang didukung oleh program bantuan berupa sarana dan prasarana serta pendampingan intensif bagi petani sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas. Adanya dukungan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), perbenihan tanaman pertanian, perbibitan ternak, pengembangan SDM pertanian, dan pencegahan

serta pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang baik di wilayah DIY sehingga mendukung peningkatan produksi pertanian.

Perbandingan pencapaian dari tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.6. Perbandingan PDRB Year on Year (YoY)

No	Indikator Sasaran	PDRB 2021	PDRB 2022	Perbandingan PDRB 2022 terhadap 2021	Pertumbuhan Antar Tahun
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (Juta Rupiah) (<i>Sumber BPS</i>)	7.496.829**)	7.814.167***)	104,23% $\left[\frac{7.814.167}{7.496.829} \times 100\% \right]$	4,23% $\left[\frac{7.814.167 - 7.496.829}{7.496.829} \times 100\% \right]$

***) Angka Sangat Sementara

***) Angka Prediksi

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2023

Tabel di atas menunjukkan pencapaian PDRB tahun 2022 sebesar 7.814.167 juta rupiah atau tercapai sebesar 106,64% dari target tahun 2022. Perbandingan capaian PDRB tahun 2022 terhadap capaian tahun 2021 sebesar 104,23% atau nilai pertumbuhan antartahunnya sebesar 4,23%.

Kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara agregat yang dapat dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui PDRB sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan sumberdaya yang dihasilkan suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan dalam pengembangan sektor perekonomian dan pengolahan sumber daya yang ada.

Capaian sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh capaian produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Berikut Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2022:

**Tabel III.7. Capaian Program yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Strategis 1 Tahun 2022**

No.	Indikator Program	Kinerja		
		Target	Realisasi**	% Realisasi
1	Produksi tanaman pangan (ton)	2.313.500	2.328.120	100,63
2	Produksi hortikultura (ton)	402.750	387.820	96,29
3	Produksi Perkebunan (ton)	69.290	64.072,01	92,47
4	Populasi ternak (Animal Unit (AU))	628.870	625.021	99,39
5	Tingkat pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian (nilai/skor)	76	76	100,00
6	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura (hektar)	900	903,49	100,39
7	Persentase pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95	98,82	104,02
8	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura bersertifikat yang terdistribusi (%)	91	97,58	107,23
9	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	98	100	102,04

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Berdasarkan tabel di atas, realisasi produksi tanaman pangan di tahun 2022 sebesar 2.328.120 ton atau terealisasi sebesar 100,63% dari target yang ditetapkan 2.313.500 ton. Pencapaian target dihitung dari nilai produksi dalam satuan ton ($\text{produksi (ton)} = \text{luas panen (ha)} \times \text{produktivitas (ton/ha)}$) dan menjumlahkan hasil produksi tanaman pangan selama 1 tahun menggunakan Angka Sangat Sementara dengan rincian:

Tabel III.8. Produksi Tanaman Pangan di D.I. Yogyakarta 2021-2022**

No.	Komoditas	Produksi (Ton)		
		2021	2022**	% Peningkatan/ Penurunan
1	Padi	875.041,00	881.199,00	0,70
3	Jagung	358.022,00	317.612,00	-11,29
4	Kacang Kedelai	8.675,00	6.903,00	-20,43

No.	Komoditas	Produksi (Ton)		
		2021	2022**	% Peningkatan/ Penurunan
5	Kacang Tanah	78.845,00	69.511,00	-11,84
6	Kacang Hijau	508,00	488,00	-3,94
7	Ubi Kayu	882.073,00	1.049.156,00	18,94
8	Ubi Jalar	2.171,00	3.251,00	49,75
9	Sorghum	22,00	-	0,00
Jumlah		2.205.357,00	2.328.120,00	5,57

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui 3 komoditas yang berkontribusi paling besar terhadap produksi tanaman pangan adalah padi, ubi kayu, dan jagung. Komoditas ubi kayu merupakan penyumbang terbesar produksi tanaman pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 sebesar 45,06%, disusul dengan komoditas padi sebesar 37,85%, dan komoditas jagung sebesar 13,64%.

Total produksi tanaman pangan tahun 2022 sebesar 2.328.120 ton, mengalami peningkatan sebesar 122.763 ton (5,57%) dari tahun 2022. Komoditas yang mengalami penurunan meliputi jagung, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Jagung, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau mengalami penurunan produksi karena petani beralih menanam komoditas lainnya dan tidak sempurnanya pembungaan sehingga biji yang dihasilkan kurang maksimal. Secara khusus pada komoditas kedelai penurunan produksi disebabkan kondisi musim yang kurang sesuai untuk pertumbuhan tanaman dan pada kacang hijau disebabkan rendahnya minat petani untuk melakukan budidaya kacang hijau.

Produksi ubi kayu, padi, dan ubi jalar pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Faktor pendorong peningkatan produksi ubi kayu adalah curah hujan yang cukup sehingga produktivitasnya meningkat. Produksi padi meningkat karena adanya program pemerintah dalam pengembangan kawasan padi berupa program IP400/OPIP (Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman), penyediaan benih unggul bersertifikat, penyediaan sarana prasarana, pengendalian Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan antisipasi dampak perubahan iklim. Produksi ubi jalar meningkat seiring dengan meningkatnya minat petani melakukan budidaya karena tingginya permintaan pasar.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2022 (angka sementara), produksi total tanaman hortikultura di DIY tahun 2022 sebesar 387.820 ton tercapai 96,29% dari target 2022 sebesar 402.750 ton. Dibandingkan dengan produksi tahun 2021 terdapat penurunan sebesar 8,62% atau sebesar 36.570 ton.

Tabel III.9. Produksi Hortikultura di D.I. Yogyakarta 2021-2022**

No	Komoditas	Produksi (Ton)		% Peningkatan/ Penurunan
		2021	2022**	
1	Cabai besar	2.538	1.719	-32,24
2	Cabai rawit	15.933	15.198	-4,62
3	Cabai keriting	35.840	33.665	-6,07
4	Bawang merah	29.809	21.990	-26,23
5	Pisang	68.257	80.827	18,42
6	Kelengkeng	1.363	694	-49,05
7	Salak	57.296	55.139	-3,77
8	Anggur	30	21	-30,45
9	Jahe	5.121	4.970	-2,95
10	Kencur	1.875	2.675	42,70

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Komoditas sayuran strategis seperti cabai besar, cabai rawit, cabai keriting, dan bawang merah mengalami penurunan. Produksi cabai besar mengalami penurunan 32,24%, cabai rawit menurun 4,62%, cabai keriting menurun 6,07%, dan bawang merah menurun 26,23% dibanding tahun 2021. Penurunan dikarenakan perubahan iklim yang ekstrim dimana sepanjang tahun 2022 terjadi curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan sebagian besar tanaman cabai besar dan cabai rawit mengalami gagal panen. Komoditas bawang merah mengalami penurunan dikarenakan adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta tingginya harga benih bawang merah membuat petani beralih ke komoditas lain.

Penurunan produksi salak disebabkan oleh peremajaan tanaman salak pada pertanaman yang umurnya sudah tua dan tidak produktif sehingga saat

ini belum dapat memproduksi. Pada tahun 2022, komoditas unggulan biofarmaka yaitu jahe produksinya mengalami penurunan dikarenakan curah hujan yang tinggi dan harga jual produk yang rendah sehingga petani beralih menanam komoditas lain yang nilai ekonomisnya lebih tinggi.

Beberapa komoditas unggulan perkebunan mengalami peningkatan produksi pada tahun 2022 ini, meliputi komoditas kakao, cengkeh, tembakau rakyat, kopi, jambu mete, dan teh. Produksi kakao meningkat 5,15%, cengkeh meningkat 4,59%, tembakau rakyat meningkat 13,08%, kopi meningkat 2,34%, mete meningkat 0,57%, dan teh meningkat 5,29%.

Komoditas unggulan lainnya, yaitu kelapa dan tebu mengalami penurunan produksi. Komoditas kelapa mengalami penurunan 0,48% dan tebu menurun 1,15%. Tingginya curah hujan mengakibatkan tingginya serangan hama penyakit, sementara upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swadaya pekebun belum mampu mengatasi seluruh serangan yang ada.

Tabel III.10. Produksi Perkebunan di D.I. Yogyakarta 2021-2022**

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Wujud Produksi
		2021	2022**	% Peningkatan/ Penurunan	
1	Kelapa	50.488,34	50.243,61	-0,48	Kopra
2	Tebu	8.336,28	8.240,12	-1,15	gula hablur
3	Kakao	1.759,70	1.850,39	5,15	biji kering
4	Cengkeh	725,80	759,13	4,59	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	707,16	799,63	13,08	daun kering
6	Kopi	525,77	538,07	2,34	biji kering
7	Jambu Mete	474,08	476,8	0,57	biji kering
8	The	227,13	239,14	5,29	daun kering

*Keterangan: ** Angka Sangat Sementara*

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Meningkatnya produksi pada beberapa komoditas perkebunan antara lain didukung oleh adanya harga yang menarik, jaminan harga, dan kepastian pasar sehingga mendorong petani memelihara tanamannya dengan baik. Selain itu peningkatan produksi dipengaruhi oleh meningkatnya luas areal

tanam, penggunaan bibit/benih bervariasi unggul, adanya intervensi pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi, perluasan areal, pemberdayaan petani, penilaian Blok Penghasil Tinggi (BPT), pembangunan/pemeliharaan kebun sumber benih (demplot, kebun induk, kebun entres dan lain-lain), fasilitasi bibit/benih unggul, penanganan pascapanen, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), peningkatan kapasitas Sumber Daya Insani (SDI), dan penguatan kelembagaan.

Untuk tembakau, dengan adanya alokasi Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) kepada daerah penghasil tembakau, telah dioptimalkan Pemda DIY untuk melakukan pembinaan kepada para petani secara intensif sehingga mampu meningkatkan produksi.

Populasi ternak di DIY pada tahun 2022 sebanyak 16.831.703 ekor atau 625.021 Animal Unit (AU), mengalami penurunan 0,84% jika dibanding dengan populasi tahun 2021 sebanyak 630.324 AU. Rincian populasi peternakan tahun 2021 dan 2022 di DIY disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel III.11. Populasi Ternak di D.I. Yogyakarta 2021-2022**

No	Komoditas	Populasi (Animal Unit (AU))		
		2021	2022**	% Peningkatan/ Penurunan
1	Sapi Potong	245.714	230.425	-6,22%
2	Sapi Perah	2.660	2.562	-3,68%
3	Kuda	1.212	1.126	-7,10%
4	Kerbau	429	380	-11,42%
5	Babi	1.860	1.819	-2,20%
6	Kambing	45.912	47.097	2,58%
7	Domba	18.800	18.221	-3,08%
8	Ayam buras	69.278	70.121	1,22%
9	Ayam Ras Petelur	94.249	96.700	2,60%
10	Ayam Ras Pedaging	136.839	143.135	4,60%
11	Itik	13.371	13.435	0,48%
TOTAL		630.324	625.021	-0,84%

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Populasi sapi potong mengalami penurunan sebanyak 20.117 ekor atau sebesar 6,22%. Penurunan ini disebabkan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyerang ternak sapi sebanyak 13.641 ekor, menyebabkan kematian 558 ekor, dan potong bersyarat 491 ekor. Komoditas strategis peternakan juga mengalami penurunan populasi, meliputi: sapi perah, kerbau, babi, dan domba. Penurunan populasi sapi perah, kerbau, domba, dan babi disebabkan karena ternak tersebut merupakan hewan rentan Penyakit Mulut dan Kuku yang sedang mewabah sehingga peternak masih fokus untuk mencegah dan/atau menangani ternaknya dari serangan PMK dan belum berani melakukan penambahan populasi ternak. Data menunjukkan, sampai dengan akhir tahun 2022 serangan PMK pada kambing sebanyak 202 ekor, domba sebanyak 670 ekor, dan kerbau sebanyak 23 ekor. Populasi domba menurun 3,08% dan kerbau menurun 11,42% dibanding tahun sebelumnya. Komoditas ternak kambing pada tahun 2022 mengalami peningkatan 2,58%, didukung adanya program bantuan hibah ternak kambing dan ketersediaan hijuan pakan ternak yang cukup memadai.

Komoditas peternakan lainnya mengalami peningkatan populasi pada tahun 2022, meliputi: ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik. Populasi ayam buras mengalami peningkatan sebesar 1,22%, ayam ras petelur sebesar 2,60%, ayam ras pedaging 4,60% dan itik sebesar 0,48%. Peningkatan populasi dipengaruhi adanya permintaan pasar yang cukup tinggi untuk mendukung Program Keluarga Harapan (PKH). Beternak unggas cukup menguntungkan sehingga minat untuk beternak baik dalam skala komersial maupun rumah tangga juga meningkat.

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Dukungan anggaran baik melalui dana APBD, Danais, DBH-CHT, DID, dan APBN dalam pengembangan kawasan komoditas unggulan per subsektor.
- b. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan.
- c. SDM aparatur pelaksana yang kompeten.
- d. Penyediaan benih unggul yang bersertifikat.
- e. Penyediaan sarana prasarana yang mendukung peningkatan produksi.
- f. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan antisipasi dampak perubahan iklim sedini mungkin.

- g. Penerapan GAP (*Good Agriculture Practice*) dan SOP (*Standard Operating Procedure*) di tingkat petani.
- h. Pendampingan dari petugas lapangan pertanian.
- i. Peningkatan ketersediaan dan mutu bibit ternak, tanaman pakan ternak, dan bahan pakan.
- j. Peningkatan kapasitas SDM peternak melalui bimbingan teknis budidaya peternakan dan pengembangan pakan.
- k. Optimalisasi reproduksi ternak betina.
- l. Pengawasan pemotongan betina produktif.
- m. Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
- n. Penerapan sistem manajemen usaha tani yang sesuai
- o. Rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi.
- p. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Insani (SDI), pemberdayaan pekebun, dan penguatan kelembagaan.
- q. Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih.
- r. Penanganan pascapanen, pengolahan, fasilitasi pemasaran, standarisasi mutu, dan pembinaan usaha pertanian yang berkelanjutan.
- s. Pelayanan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan.

3.1.2. Sasaran 2: Terwujudnya Ketahanan Pangan

Tolok ukur capaian sasaran “**Terwujudnya Ketahanan Pangan**” diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	% AKG X Bobot

Kinerja sasaran “**Terwujudnya Ketahanan Pangan**” dihitung menggunakan data dari tabel konsumsi hasil SUSENAS BPS (tahun n) dengan menggunakan aplikasi penghitungan Skor PPH yang disediakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Berikut adalah capaian Skor PPH tahun 2022:

Tabel III.13. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,70	91,12	96,80	106,23 [(96,80/91,12) x 100%]	91,12	106,23 [(96,80/91,12) x 100%]

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran Terwujudnya Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan tercapai 96,80 melebihi target tahun 2022 dengan persentase capaian 106,23%.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu, capaiannya meningkat 101,15% atau nilai pertumbuhan antar tahunnya sebesar 1,15%.

Tabel III.14. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2021 dan 2022

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	
		2021	2022
1.	Padi-padian	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	1,3	1,3
3.	Pangan Hewani	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,7	0,6
6.	Kacang-kacangan	7,2	8,4
7.	Gula	2,5	2,5
8.	Sayur dan Buah	30,0	30,0
9.	Lain-lain	-	-
Total		95,70	96,80

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 106,23%.
- d. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran **“Terwujudnya Ketahanan Pangan”** didukung oleh:

Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik dengan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait. Sampai dengan 31 Desember 2022, jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras telah mencapai 280,884 ton. Selama ini, pengelolaan dan penitipan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dikerjasamakan dengan Perum BULOG Divre Yogyakarta dan PT Taru Martani. Beras CPPD DIY yang dititipkan di BULOG sebanyak 31,875 ton dan di PT Taru Martani sebanyak 249,009 ton.

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah DIY telah menyalurkan bantuan cadangan pangan sebanyak 11.657,5 kg beras yang ditujukan untuk warga yang terdampak bencana alam, meliputi: bencana banjir di Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta; bencana gempa bumi di Cianjur Jawa Barat; dan bencana puting beliung di Selopamioro, Imogiri, Bantul.

Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pengadaan tiap tahunnya. Cadangan pangan sangat berguna ketika terjadi kerawanan maupun krisis pangan dan bencana. Distribusi dan akses pangan juga terus ditingkatkan. Harga pangan pokok di DIY relatif terkendali dengan adanya dukungan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Harga pokok dipantau secara rutin dan apabila diperlukan, dilakukan operasi pasar untuk pengendalian harga.

Meningkatnya Skor PPH juga didukung dengan adanya gerakan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari), dan penjaminan mutu pangan masyarakat dari sisi aspek keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Aspek keamanan pangan disebutkan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimiawi, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mengamanatkan bahwa urusan pangan merupakan urusan banyak pihak oleh karena itu harus melibatkan lintas sektor dengan harapan potensi cemaran kimia, fisik, biologis maupun mikrobiologis pada pangan segar dan olahan dapat dicegah atau diminimalisir di sepanjang rantai pasok pangan mulai dari proses produksi dengan menerapkan *Good Agriculture Practices (GAP)/Good*

Farming Practices (GFP), pasca panen dengan *Good Handling Practices* (GHP), pengolahan dengan *Good Manufacturing Practices* (GMP), distribusi dengan *Good Distribution Practices* (GDP) dan *Good Retailing Practices* (GRP), sehingga pangan segar dan olahan sampai ditingkat konsumen dalam kondisi aman dikonsumsi.

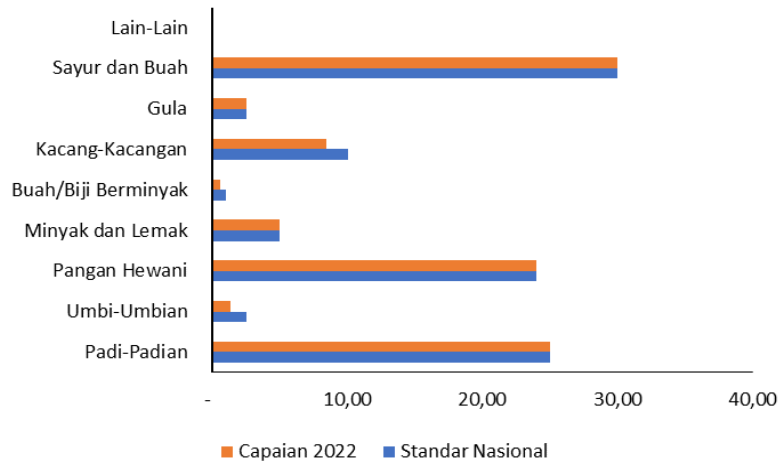
Penanganan keamanan pangan di wilayah DIY dilaksanakan oleh Instansi yang menangani pangan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-DIY. Kegiatan penanganan keamanan pangan dilakukan dalam bentuk pengawasan *pre-market* maupun *post market* dengan tujuan meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman yang beredar untuk mendukung kesehatan masyarakat, meningkatnya daya saing PSAT baik di pasar domestik maupun ekspor, dan meningkatnya ketertelusuran PSAT (*traceability*).

Pada tahun 2022 telah dilakukan pengawasan keamanan pangan dan pengujian *post-market* terhadap 234 produk PSAT (buah, sayur, dan beras curah) yang beredar di 5 kabupaten/kota di DIY. Hasil pengawasan ini menunjukkan bahwa sebesar 99,90% PSAT di 5 kabupaten/kota di DIY aman untuk dikonsumsi.

Khusus untuk pengawasan *pre-market* berupa penjaminan keamanan pangan dan dukungan peningkatan ekspor PSAT, OKKP-D DIY telah menerbitkan 35 izin edar Produk Domestik (PD) PSAT, 11 Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik (*SPPB*) PSAT untuk 11 unit penanganan PSAT, Perpanjangan Registrasi 1 *Packing House* (PH) dan *Surveillance* ke 15 pelaku PSAT tersertifikasi dan teregistrasi dengan hasil semua pelaku dinyatakan masih konsisten dalam pemenuhan standar keamanan pangan.

Seiring dengan terbitnya aturan turunan UU Cipta Kerja, yaitu PP No. 5 tahun 2021 dan Permentan 15 tahun 2021, dilakukan juga pembinaan dan pendampingan kelembagaan OKKP-D tingkat Kabupaten/Kota dalam melakukan pelayanan penjaminan keamanan pangan. Hingga saat ini telah terbit 108 Nomor Registrasi Pangan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK) oleh OKKP-D Kabupaten/kota.

Gambar III.1 Grafik Perbandingan Skor PPH Standar dan Capaian Skor PPH DIY Tahun 2022



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin meningkat, menunjukkan konsumsi masyarakat yang semakin beragam jenisnya dan semakin bergizi asupannya. Dari data yang diolah menggunakan aplikasi dari Bapanas, Skor PPH DIY tahun 2022 sebesar 96,80 atau tercapai 106,23% dari target tahun 2022 yaitu 91,12. Terlihat dari Grafik III.2 diketahui bahwa Skor PPH untuk kacang-kacangan, biji-bijian, dan umbi-umbian masih dibawah angka standar. Ke depannya masyarakat masih perlu didorong untuk meningkatkan konsumsi beberapa golongan pangan alternatif yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan agar kebutuhan energi tercukupi dengan memperhatikan kaidah konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

Tabel III.15. Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2022

No.	Indikator Program	Kinerja		
		Target	Realisasi**	% Realisasi
1	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Konsumsi Energi	0,08	-2,80	-3.500

Indikator Peningkatan Ketersediaan dan Konsumsi Energi dihitung dari rata-rata peningkatan angka ketersediaan energi dan peningkatan angka

konsumsi energi antara tahun 2022 dengan tahun 2021. Angka ketersediaan energi diperoleh dari Neraca Bahan Makanan yang disusun oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bersama dengan beberapa instansi terkait sebagai penyedia data untuk penghitungan, sedangkan angka konsumsi energi merupakan *output* lain yang dihasilkan pada saat penghitungan Skor PPH menggunakan data SUSENAS BPS. Capaian angka ketersediaan energi tahun ini sebesar 3.732 kkal/kap/hari sama dengan capaian tahun 2021. Capaian angka konsumsi energi tahun ini sebesar 2.024 kkal/kap/hari atau turun 120 kkal/kap/hari dibanding capaian tahun sebelumnya 2.144 kkal/kap/hari atau turun 5,60%. Jika dirata-rata maka capaian kinerja peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi menjadi -2,80%. Capaian ini diperoleh dari total persentase peningkatan angka ketersediaan energi dan konsumsi energi di tahun 2021 sebesar $(0\% + (-5,60\%))/2$ yaitu sebesar -2,80%.

Standar kecukupan energy yang digunakan dalam Renstra 2017-2022 masih sebesar 2.000 kkal/kap/hari sehingga tingkat konsumsi energi DIY sudah berada diatas standar tersebut. Namun hal ini tetap harus dijaga agar tidak terus meningkat atau menurun jauh di bawah standar. Jika diatas angka standar dapat memicu timbulnya penyakit degeneratif, sedangkan jika terus menurun akan mengakibatkan ketidakcukupan energi untuk membentuk tubuh sehat yang menunjang hidup aktif dan produktif.

Penurunan konsumsi energi terjadi pada kelompok padi-padian dan gula. Hal ini sesuai dengan tujuan program pemerintah terkait diversifikasi/ penganekaragaman pangan lokal yang bersumber dari bahan non padi-padian.

Keberhasilan pencapaian sasaran **“Terwujudnya Ketahanan Pangan”** didukung dari terselenggaranya 3 sub sistem ketahanan pangan yaitu: 1). ketersediaan, dimana capaian angka ketersediaan energi tahun 2022 sebesar 3.732 kkal/kap/hari yang melebihi standar anjuran Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2.400 kkal/kap/hari, jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 280,884 ton; 2). keterjangkauan/ distribusi, dengan terjaganya stabilisasi harga pangan pokok strategis melalui fasilitasi untuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), Pasar Mitra Tani (PMT); dan 3). konsumsi serta keamanan pangan, terlaksana melalui gerakan penganekaragaman pangan, konsumsi pangan lokal, pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), dan sertifikasi/registrasi PSAT.

Faktor Pendukung Keberhasilan

- a. Tercapainya indikator skor PPH didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA.
- b. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari).
- c. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai.
- d. Aspek distribusi dan akses pangan yang terus diperkuat dan ditingkatkan. Salah satu upaya dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan Pasar Mitra Tani (PMT) dan Gelar Pangan Murah yang menggandeng supplier dan distributor pangan. Dalam masa pandemi sampai saat ini PMT melakukan kerjasama dengan *market place online* seperti Aplikasi PAS TANI, *Grab Mart*, *Go Food/Go Shop* dengan memberikan ongkos kirim murah/potongan harga ongkos kirim jika belanja di PMT.

3.1.3. Sasaran 3: Pemenuhan Pangan Masyarakat

Tolok ukur capaian sasaran “**Pemenuhan Pangan Masyarakat**” diukur dengan indikator Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator, dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 16. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Pemenuhan Pangan Masyarakat	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dibagi pengeluaran rata-rata perkapita sebulan total dikali 100% (Data BPS)

Capaian persentase pengeluaran rata-rata per kapita per bulan untuk makanan belum dirilis BPS, sehingga angka capaian menggunakan angka prediksi

OPD dari hasil proyeksi terhadap data beberapa tahun sebelumnya. Data disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.17. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi**	% Realisasi**		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	41,94	38,65	41,39**	92,91 [(38,65-(41,39-38,65))/38,65 x 100%]	38,65	92,91 [(38,65-(41,39-38,65))/38,65 x 100%]

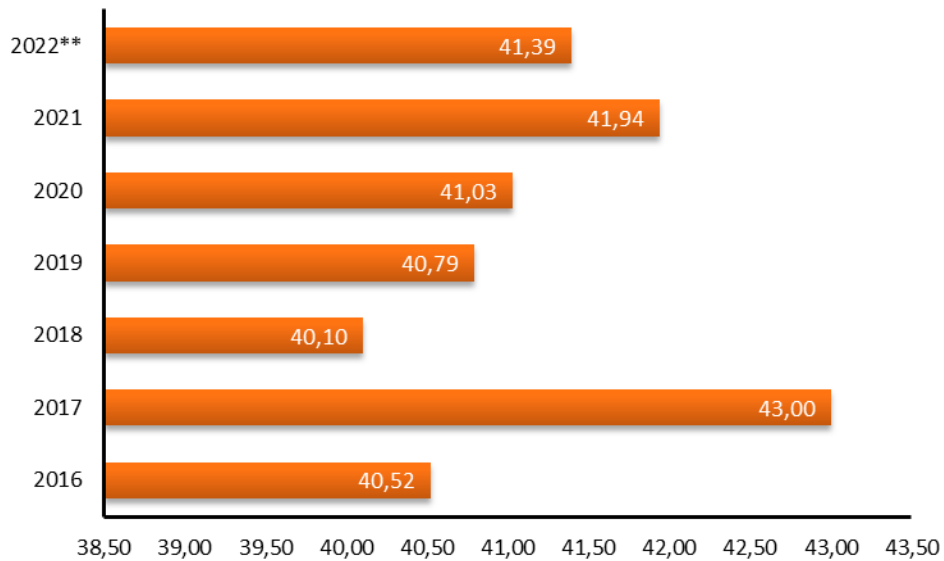
Keterangan: ** Angka Prediksi

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran “Pemenuhan Pangan Masyarakat” adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tercapai 41,39%, persentase capaian 92,91% dari target 2021 (dengan rumus *inverse*).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu mengalami penurunan sebesar 0,55%. Untuk indikator yang dihitung dengan rumus *inverse*, capaian yang menurun menunjukkan kinerja yang semakin baik atau ada peningkatan capaian sebesar 1,31% dibanding tahun sebelumnya.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 92,91%.
- d. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 3 didukung oleh upaya penanganan kerawanan pangan dan penurunan kemiskinan di DIY yang terus dilaksanakan secara lintas sektor dengan optimalisasi program kegiatan dari dana APBD (Reguler maupun Dana Keistimewaan) dan APBN.

Gambar III.2. Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan Tahun 2016-2022 (Angka Prediksi)**



Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Melihat *trend* capaian persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dalam periode 7 tahun ke belakang cukup fluktuatif, antar tahun ada yang mengalami kenaikan ada pula yang menurun. Namun jika dihitung menggunakan metode proyeksi dengan asumsi *ceteris paribus*, mengalami peningkatan sebesar 1,31% (menggunakan rumus *inverse*) dari tahun 2021, angka perkiraan tahun 2022 sebesar 41,39%.

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan adalah persentase pendapatan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli makanan dibanding dengan semua pengeluaran untuk membeli makanan dan non makanan. Pengeluaran per kapita untuk makanan sering dijadikan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Pengeluaran per kapita untuk makanan erat kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh dalam suatu rumah tangga. Suatu rumah tangga diindikasikan berpenghasilan rendah apabila pengeluaran rumah tangga untuk makanan terhadap total pengeluaran lebih besar

daripada pengeluaran rumah tangga untuk non makanan terhadap total pengeluaran. Pendapatan yang diperoleh rumah tangga mencerminkan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga tersebut.

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan merupakan indikator kinerja kedua untuk urusan pangan. Data capaian tahun 2022 belum dirilis oleh BPS sehingga capaiannya menggunakan angka proyeksi.

Kondisi ekonomi yang melemah di masa pandemi berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Jika ditinjau dari teori Hukum Engel apabila pendapatan masyarakat menurun maka pengeluaran untuk makanan akan meningkat. Capaian tahun 2022 diprediksi lebih baik dibanding tahun 2021 karena kondisi perekonomian yang sudah membaik. Capaiannya diprediksi sebesar 41,39%. Angka ini lebih rendah dari tahun 2021, yakni sebesar 41,94%. Menurut teori yang ada, hal ini cukup baik karena semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan mengindikasikan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Pengeluaran untuk beberapa kelompok makanan mengalami penurunan, namun di sisi lain pengeluaran untuk rokok masih cukup tinggi. Data hasil survei BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa rokok bagi masyarakat miskin menjadi pengeluaran terbesar kedua setelah beras. Pengeluaran untuk membeli rokok lebih tinggi dibandingkan untuk protein seperti telur, tempe atau ikan sehingga walaupun capaian kinerja tahun 2022 sudah lebih baik namun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 38,65%.

Selain meningkatkan perekonomian masyarakat, edukasi tentang pola konsumsi yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan mengoptimalkan diversifikasi pangan terutama pangan lokal menjadi cara menurunkan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk belanja bahan makanan. Hal ini perlu didukung dengan berbagai upaya lintas sektor dalam rangka mengurangi konsumsi rokok, termasuk yang menyasar pada generasi muda.

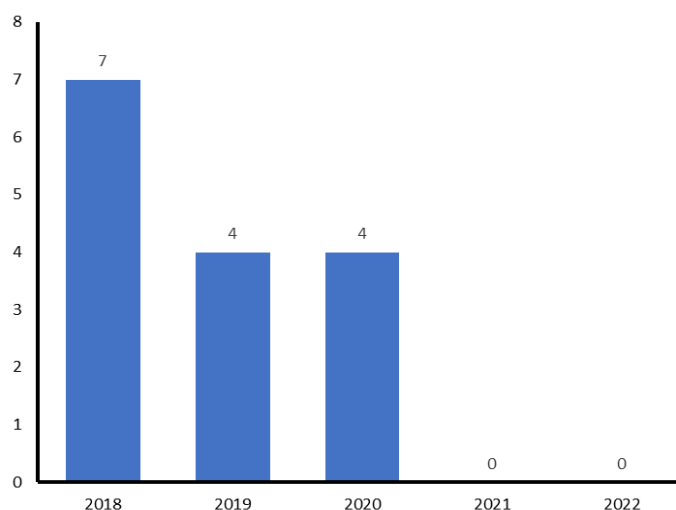
Tercapainya sasaran didukung oleh capaian program pada sasaran ini yakni:

**Tabel III.18. Capaian Program yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Strategis 3 Tahun 2022**

No.	Indikator Program	Kinerja		
		Target	Realisasi**	% Realisasi
1	Jumlah Desa Rawan Pangan	0	0	100

Sejak tahun 2021 DIY sudah bebas dari Desa Rawan Pangan. Capaian tersebut dapat dipertahankan sampai dengan tahun 2022 ini. Target akhir RPJMD tahun 2022 sudah tercapai namun berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan masih perlu dilakukan mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab utama kerawanan pangan di DIY. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dilaksanakan antara lain melalui Program Desa Mandiri Pangan (Demapan), Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), dan Pengembangan Korporasi Usahatani, Pertanian Keluarga, dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Gambar III.3. Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Faktor Penghambat Keberhasilan

- a. Kondisi ekonomi yang melemah di masa pandemi yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat akan mempengaruhi pola pengeluaran konsumsi masyarakat.
- b. Tingkat konsumsi rokok cenderung meningkat selama masa pandemi ini (rokok juga masuk dalam golongan pengeluaran untuk makanan). Berdasarkan survei BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa rokok menjadi pengeluaran terbesar kedua setelah beras bagi masyarakat miskin.

Walaupun masih ada hambatan, kinerja penanganan kerawanan pangan telah berhasil baik, diindikasikan dengan tidak adanya Desa Rawan Pangan di DIY. Hal ini tidak terlepas dari dukungan para pihak terkait. Di masa mendatang kerjasama dan sinergitas program/kegiatan lintas sektor perlu terus ditingkatkan untuk mempertahankan status DIY sebagai daerah yang aman pangan sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Sebelum pandemi Covid-19, beberapa indikator menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan belum berada pada jalur yang tepat. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung menyebabkan upaya untuk mencapai target agenda SDG's 2030 menjadi semakin berat. SDG's merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan telah disepakati oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No One Left Behind*".

Delapan tahun perjalanan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seharusnya telah memberikan pencapaian yang dapat dijadikan modal untuk menghadapi berbagai macam krisis. Namun, krisis di berbagai bidang sebagai dampak dari pandemi Covid-19 nampaknya masih belum dapat teratasi. Upaya

untuk mengatasi penyebaran Covid-19 belum dapat dilakukan secara tuntas dan diperkirakan akan terus berlangsung.

Wujud komitmen tertinggi Indonesia dalam pelaksanaan SDG's adalah terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia segera menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) lima tahunan dan pemerintah daerah menjabarkannya dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD). Secara berkala, pemerintah juga akan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk melihat kemajuan capaian sasaran SDG's.

Tabel III.19. Capaian Indikator yang Mendukung Sustainable Development Goals (SDG's)

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022**
<i>Tabel 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</i>							
2.2.6	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	12,30	12,00	12,50	12,40	12,40
2.2.9	Skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	89,92	91,70	94,70	95,70	96,80
2.2.10	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	7	4	4	0	0
<i>Tabel 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.</i>							
2.3.1	Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)*	Ha	104.905,76	104.905,76	104.905,76	104.905,76	104.905,76
2.3.2	Produksi tanaman pangan	Ton	2.147.624,00	2.044.938,00	2.376.185,00	2.205.357,00	2.328.120,00
2.3.3	Produksi hortikultura	Ton	396.406,00	398.500,00	411.340,00	424.390,20	387.820,00
2.3.4	Populasi ternak	Animal Unit	569.843,00	581.371,00	605.946,00	630.326,00	625.021,00
2.3.5	Produksi perkebunan	Ton	66.507,50	62.537,59	64.668,92	64.214,77	64.072,01

Sumber:

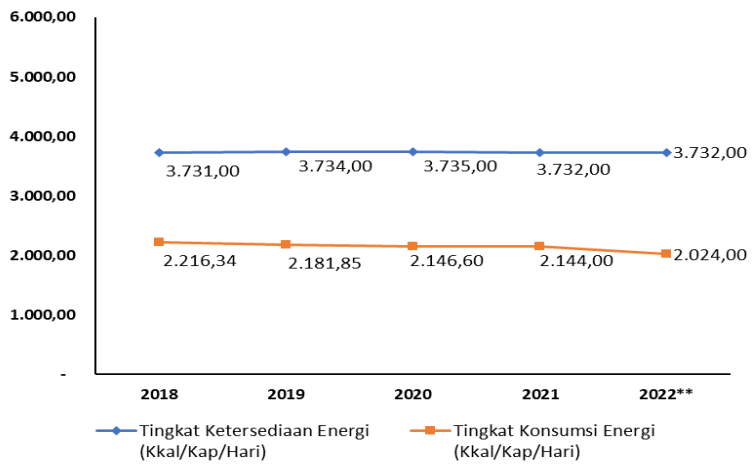
*) Berdasarkan pada:

1. *Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019*
2. *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039*
3. *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*

Di Indonesia, implementasi tujuan dan target SDG's dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY turut mendukung **Pilar Pembangunan Sosial** untuk mencapai **"Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan"**.

Berdasarkan informasi Program Pangan Dunia (*World Food Programme/WFP*), konflik, guncangan iklim, dampak COVID-19 yang berkelanjutan, dan meningkatnya biaya hidup membuat semakin banyak anak-anak kekurangan gizi akut sementara layanan utama kesehatan, nutrisi, dan penyelamatan hidup lainnya menjadi kurang dapat diakses. Saat ini, lebih dari 30 juta anak di 15 negara yang terkena dampak paling parah menderita malnutrisi akut dengan 8 juta dari anak-anak ini sangat kurus dan merupakan bentuk kekurangan gizi yang paling mematikan. Ini adalah ancaman besar bagi kehidupan anak-anak dan kesehatan serta perkembangan jangka panjang. Rencana Aksi Global membahas perlunya pendekatan multi-sektoral dan menyoroti tindakan prioritas untuk pemenuhan nutrisi seluruh ibu dan anak di dunia melalui makanan, kesehatan, air dan sanitasi, serta sistem perlindungan sosial. Menanggapi meningkatnya kebutuhan, badan-badan PBB mengidentifikasi lima tindakan prioritas yang akan efektif dalam mengatasi kekurangan gizi akut di negara-negara yang terkena dampak konflik dan bencana alam dan dalam keadaan darurat kemanusiaan. Tindakan ini perlu diwujudkan karena sangat penting untuk mencegah dan mengobati kekurangan gizi akut pada anak-anak, dan mencegah kematian yang tragis (PBB, 2023).

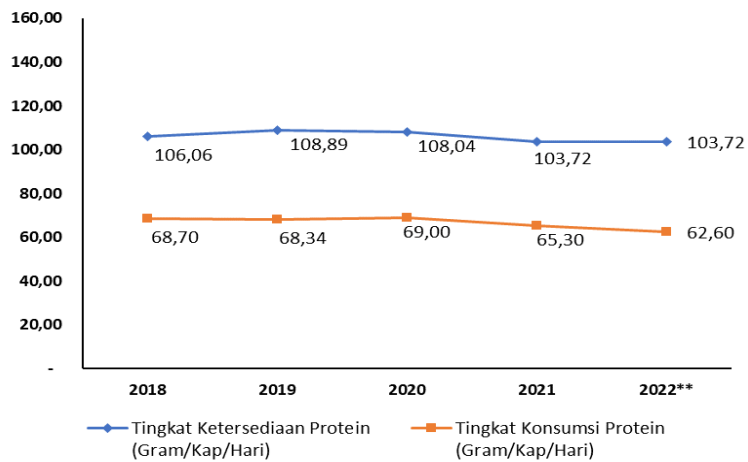
Gambar III.4. Tingkat Ketersediaan dan Tingkat Konsumsi Energi Rata-Rata Per Kapita per Hari Tahun 2018-2022 (Angka Sangat Sementara)**



****)** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Gambar III.5. Tingkat Ketersediaan dan Tingkat Konsumsi Protein Rata-Rata Per Kapita per Hari Tahun 2018-2022 (Angka Sangat Sementara)**



****)** Angka Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Berdasarkan grafik diketahui bahwa konsumsi energi per hari rata-rata penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 tercatat sebesar 2.024 kkal/kapita/hari dan konsumsi protein per hari rata-rata sebesar 62,60 gram/kapita/hari. Terlihat dalam grafik bahwa tingkat ketersediaan energi pangan dan protein masih mencukupi untuk konsumsi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, baik konsumsi kalori maupun protein penduduk DIY pada tahun 2022 tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.000 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebanyak 57 gram/kapita/hari.

Capaian konsumsi ikan berdasarkan data SUSENAS BPS pada tahun 2021 dan 2022 adalah sama, sebesar 12,40 kg/kapita/tahun. Ke depan, DPKP DIY akan terus berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) DIY dalam rangka peningkatan ketersediaan sumber protein hewani khususnya ikan dan penganekaragaman konsumsi pangan utamanya melalui Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan oleh Dislautkan.

Dalam mewujudkan pertanian dan pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah menginisiasi *review* terhadap Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Pertanian Berkelanjutan sampai terbit Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini diusulkan untuk mengakomodasi adanya perubahan kebijakan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Perubahan kebijakan ini antara lain, adanya perubahan materi yang diundangkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039, sehingga perlu penyesuaian kebijakan dalam perencanaan dan penetapan lahan pertanian berkelanjutan. Penyesuaian yang dimaksud ialah terhadap Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) semula memiliki luas 35.911,59 Ha telah berubah menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 104.905,76 Ha sesuai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun

2019. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ini terdiri dari lahan inti seluas 72.409,79 Ha dan lahan cadangan 32.495,97 Ha.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini untuk mewujudkan perlindungan dan terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Perubahan ini juga untuk meningkatkan peran serta pemerintah dan pemangku kepentingan terkait terhadap pelaksanaan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan.

3.3 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
				Target	Realisasi**	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	Juta Rupiah	7.327.757	7.534.313	102,82	42.215.030.908	38.896.305.010	92,14	3.318.725.898
2	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,12	96,80	106,23	1.574.082.750	1.526.961.215	97,01	47.121.535
3	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	%	38,65	41,39	92,91	95.892.000	93.702.535	97,72	0
Jumlah yang Terkait Langsung Capaian Sasaran							43.885.005.658	40.516.968.760	92,33	3.365.847.433
Program pendukung							54.728.526.506	52.990.400.212	96,82	1.738.126.294
Total Belanja							98.613.532.164	93.507.368.972	94,82	5.103.973.727

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

Berdasarkan Tabel III.20 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melampaui target kinerja tahun 2022 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 40.516.968.760,00, atau terealisasi 92,33% dari target sebesar Rp. 43.885.005.658,00 dan terdapat efisiensi anggaran Rp. 3.365.847.433,00. Program pendukung terealisasi Rp. 52.990.400.212,00 atau terealisasi sebesar 96,82% dari target Rp. 54.728.526.506,00. Efisiensi anggaran bersumber dari:

- a. Sisa pengadaan barang dan jasa
- b. Efisiensi belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas, belanja operasional kendaraan dinas, belanja listrik, *telephone*, dan air.
- c. Efisiensi belanja honorarium pembicara, narasumber, moderator serta efisiensi gaji dan tunjangan pegawai didasarkan pada kesesuaian perubahan jumlah SDM yang ada.

3.4 Inovasi

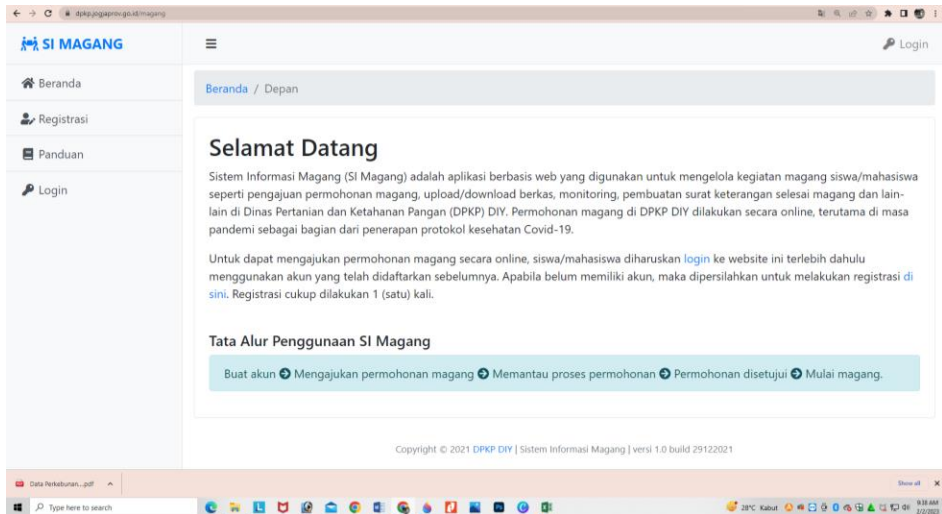
Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Sistem Informasi Magang (SI Magang)

Sistem Informasi Magang (SI Magang) adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola kegiatan magang siswa/mahasiswa seperti pengajuan permohonan magang, *upload/download* berkas, monitoring, serta pembuatan surat keterangan selesai magang di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY. Permohonan magang di DPKP DIY dilakukan secara *online*, terutama sejak masa pandemi sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Untuk dapat mengajukan permohonan magang secara online, siswa/mahasiswa diharuskan login ke website terlebih dahulu menggunakan akun yang telah didaftarkan sebelumnya. Apabila belum memiliki akun, maka dipersilahkan untuk melakukan registrasi. Registrasi cukup dilakukan 1 (satu) kali. Aplikasi ini menempel pada aplikasi *website* Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dengan alamat <https://dpkp.jogjaprovo.go.id/magang>.

Gambar III.6. Sistem Informasi Magang (SI Magang)



b. *Ear Tagging* pasca vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Kegiatan penandaan dan pendataan ternak (Sapi dan Kerbau) pasca vaksinasi sangat penting karena untuk mengidentifikasi ternak, sehingga pelaksanaan vaksinasi dapat ditelusuri. Pendataan secara digital ini sekaligus dilakukan untuk memonitoring jumlah populasi hewan, status reproduksi, dan distribusi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Gambar III.7. *Eartag Secure QR Code* dan Aplikasi Identik PKH



Penandaan dan pendataan yang dilakukan pada ternak pasca vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ini menggunakan tanda pengenal berupa *Eartag Secure QR Code* yang terhubung secara digital melalui aplikasi “**Identik PKH**” yang dapat didownload di *Google Play Store* pada handphone berbasis android. Aplikasi ini dapat mengidentifikasi ternak-ternak yang telah divaksin, belum divaksin, dan tidak divaksin melalui kartu vaksin virtual dan dapat dilihat oleh siapa saja.

3.5 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada Gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada Gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak pandemi COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.21. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	URUSAN PANGAN	A. OPD: 1. Dinas kelautan dan Perikanan	mengampu produksi perikanan	1. Perumusan kebijakan data harga, pasokan, dan akses pangan; data ketersediaan dan kebutuhan pangan yang disampaikan secara rutin ke Tim Pengendali Inflasi Daerah, Satgas Pangan, BIN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi bahan perumusan kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan.	Tim Pengendali Inflasi Daerah, Satgas Pangan, BIN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan sasaran 1: meningkatnya derajat kualitas SDM melalui pelaksanaan kebijakan pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi yang dilaksanakan melalui Program Pemda Peningkatan Usia Harapan Hidup 2. Mendukung pencapaian sasaran strategis terwujudnya ketahanan pangan dengan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang
		2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	mengampu produksi kehutanan			
		3. Dinas Perindustrian Perdagangan DIY	menyediakan data ketersediaan pangan dan dalam rangka promosi keamanan pangan pada sektor industri dan perdagangan			
		4. Dinas PUP ESDM	menyediakan sarana infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi pangan ke seluruh wilayah DIY			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		5. Dinas Perhubungan DIY	mendukung kelancaran distribusi bahan pangan ke seluruh wilayah DIY			<p>didukung oleh keberhasilan 3 sub sistem ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan/distribusi pangan, dan pemanfaatan/konsumsi pangan</p> <p>3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY</p> <p>4. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</p> <p>5. Mendukung pencapaian kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan</p>
		6. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	sosialisasi dan gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan sesuai kaidah B2SA dan pelaksanaan kantin sehat dengan sasaran anak sekolah			
		7. Dinas Pariwisata DIY	dalam rangka koordinasi dengan Hotel Restoran dan Kafe (Horeka) dalam mendorong penyediaan pangan sesuai kaidah B2SA dengan mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		8. Dinas Koperasi dan UKM	penguatan kelembagaan dan fasilitas bagi UKM maupun koperasi pengolah pangan			Ketahanan Pangan Masyarakat 6. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengawasan Keamanan Pangan
		9. Dinas Kebudayaan DIY	fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Lumbung Mata raman melalui Dana Keistimewaan			
		10. Satpol PP DIY	penegakan Perda dan Pergub keamanan pangan			
		<u>B. INSTANSI LAIN:</u>				
		1. Perum Bulog Kanwil Yogyakarta	pengelolaan stok pangan di tingkat Provinsi			
		2. Balai Besar POM DIY	registrasi mutu dan keamanan pangan olahan serta pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan			<u>Bagi Kelompok Sasaran:</u> 1. Menjadi bahan perumusan kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		3. LPPOM MUI	sertifikasi produk Halal			2. Informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, anggaran, dan penentuan sasaran dalam menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan/distribusi pangan, dan pemanfaatan/konsumsi pangan masyarakat
4. Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	menjamin keamanan pangan yang masuk ke DIY melalui mekanisme ekspor-impor	5. BPTP Yogyakarta	diseminasi teknologi pangan	6. BPS DIY	menyediakan data SUSENAS sebagai data sekunder yang digunakan untuk menghitung Skor PPH	
<u>C. DUNIA USAHA:</u>		1. Gapoktan se-DIY 2. Pelaku usaha pangan olahan 3. PHRI/Grup Accor	penyedia bahan pangan pokok yang diproduksi oleh petani/kelompok tani yang menjadi anggotanya yang selanjutnya disalurkan ke Toko Tani Indonesia untuk dijual ke konsumen dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		<p><u>D. PT:</u></p> <p>1. PT. Tarumartani</p>	<p>pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah</p>			
		<p>2. PT. Go-Jek Indonesia 3. PT. Grab Indonesia</p>	<p>hal pemasaran produk-produk TTIC/Pasar Mitra Tani secara daring</p>			
		<p><u>E. AKADEMISI:</u></p> <p>1. Fakultas Teknologi Pertanian UGM</p>	<p>diseminasi teknologi pangan</p>			
		<p><u>F. MASYARAKAT:</u></p> <p>1. PKK DIY 2. Guru PAUD/SD</p>	<p>pelaksanaan sosialisasi dan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan sesuai kaidah Beragam Bergizi Seimbang dan Aman</p>			
		<p>2. Lembaga Konsumen Yogyakarta</p>	<p>dalam rangka perlindungan konsumen</p>			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		<p>A. OPD:</p> <p>1. Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY beserta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten/kota se-DIY</p>	<p>penyedia data sekunder yang digunakan dalam analisis dan penentuan desa/kecamatan yang masuk kriteria rawan pangan dalam peta SKPG dan FSVA</p>	<p>2. Penyusunan peta FSVA dengan tujuan menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat Provinsi dan Kabupaten.</p>	<p>Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY</p>	<p>Bagi OPD:</p> <p>1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan sasaran 2: meningkatnya derajat ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin melalui Program Pemda Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>2. Mendukung pencapaian sasaran strategis pemenuhan pangan masyarakat dengan indikator Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan</p> <p>3. Mendukung pencapaian kinerja</p>
		<p>2. Dinas Sosial DIY</p>	<p>dalam rangka penjaminan hidup masyarakat miskin di Desa Rawan Pangan</p>	<p>3. Peta daerah rawan pangan adalah peta yang menggambarkan tingkat kerawanan masing-masing desa yang ditinjau dari tiga aspek, yaitu: Aspek Ketersediaan Pangan, Aspek Akses Pangan, dan Aspek Pemanfaatan Pangan. Peta daerah rawan pangan merupakan gabungan antara tiga peta, yaitu: peta ketersediaan pangan, peta akses pangan,</p>		
		<p>3. Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY</p>	<p>dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Rawan Pangan sesuai potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut</p>			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		4. Dinas PUP ESDM	dalam rangka pemenuhan infrastruktur untuk menunjang hidup yang layak bagi masyarakat miskin di Desa Rawan Pangan	dan peta aspek pemanfaatan pangan.		sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
B. INSTANSI LAIN: 1. BKKBN DIY dan BPS DIY	penyedia data sekunder yang digunakan dalam analisis dan penentuan desa/kecamatan yang masuk kriteria rawan pangan dalam peta SKPG dan FSVA	Bagi Kelompok Sasaran: 1. Informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat Provinsi dan Kabupaten				
C. AKADEMISI: 1. Universitas Negeri dan Swasta di DIY melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat	pendampingan dan pemberdayaan di Desa Rawan Pangan					

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
				<u>D. MASYARAKAT:</u> 1. PKK DIY	pelaksanaan sosialisasi dan gerakan Desa Mandiri Pangan (DeMaPan), LAPM (Lembaga Akses Pangan Masyarakat), PK (Pertanian Keluarga) dengan lokasi di daerah rawan pangan	

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
2.	URUSAN PERTANIAN	A. OPD: 1. Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY	pengarah kebijakan di sektor pertanian	1. Penyusunan peta LP2B di tingkat Kabupaten/Kota (dengan dukungan dana APBN) yang akan menjadi bahan perumusan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di DIY	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan yang dicapai melalui strategi mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan melalui Program Pemda Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa) 2. Mendukung pencapaian sasaran
		2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	pengawasan dan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	2. Pembentukan Forum Komunikasi Petani Milenial yang menjadi wadah bagi tumbuh dan berkembangnya para petani muda dalam upaya regenerasi petani		
		3. Dinas PUP ESDM	penyediaan prasarana pertanian khususnya jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya	3. Penyediaan data serangan Organisme		

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		4. Dinas Kebudayaan DIY	fasilitasi kegiatan budi daya pertanian berbasis budaya melalui kegiatan Dana Keistimewaan	Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) secara <i>real time</i> untuk merumuskan kebijakan pengendalian yang tepat 4. Pembentukan Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah di DIY 5. Kerjasama kemitraan		strategis meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan populasi ternak dengan indikator kinerja nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS) 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 4. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana
	5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY	pendampingan dan pembinaan industri olahan produk pertanian, penguatan kelembagaan UKM maupun koperasi tani, dan pengawalan dan pengawasan terhadap peredaran dan distribusi pupuk subsidi di DIY				
	6. Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota	menumbuhkan dan mengembangkan agrowisata-agrowisata di DIY, antara lain agrowisata Durian di Patuk, Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh				

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		7. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY	fasilitasi kelancaran kerjasama <i>sister province</i> dengan <i>Prefektur Yamanashi</i> (Jepang) dalam rangka mengembangkan tanaman Stroberi guna meningkatkan pendapatan petani dan mendukung agrowisata di Cangkringan, Sleman serta dengan provinsi <i>Gyongsang-bukdo</i> (Korsel) dalam rangka pengembangan jamur di Bleberan, Gunungkidul			<p>Pertanian</p> <p>5. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>6. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>7. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyuluhan Pertanian</p>

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		<u>B. INSTANSI LAIN:</u>				Bagi Kelompok Sasaran: 1. Menjadi bahan perumusan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di DIY 2. Upaya bersama pengawasan dan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian 3. Mendukung berkembangnya para petani muda dalam upaya regenerasi petani 3. Menjadi bahan kebijakan pengendalian serangan OPT/DPI tepat 4. Upaya mitigasi bencana akibat Dampak Perubahan Iklim
		1. BPTP DIY	diseminasi teknologi pertanian, bersama dengan DPKP melakukan bimtek/pelatihan dan pendampingan bagi para petani/pekebun/peternak dalam rangka budidaya <i>on farm</i> maupun <i>pasca panen</i> sampai dengan pengolahan produk pertanian sehingga memiliki nilai tambah			
		2. Balai Besar Veteriner	pengamatan dan pengidentifikasian diagnosis pengujian <i>veteriner</i> dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan dan pengujian <i>veteriner</i>			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		3. Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	pengawasan keluar masuk produk pertanian melalui mekanisme ekspor-impor, mengawal ekspor salak ke Kamboja dan China			sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan
		4. Polbangtan Yogyakarta Magelang	pengembangan SDM pertanian, termasuk pengembangan petani milenial			
		5. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Balai Besar Penelitian Jagung dan Sereal Lain, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan hijauan Pakan ternak, Balai Penelitian Tanaman Buah, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Balai Penelitian tanaman Hias, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Balai Besar Pasca Panen pertanian	penyediaan benih/bibit pertanian berkualitas serta diseminasi teknologi pertanian			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		6. Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	kerjasama Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) lintas perbatasan DIY-Jawa Tengah, magang industri bagi mahasiswa di Laboratorium Pengujian Mutu Produk Pertanian (LPMPP), dan kerjasama Pengendalian Tikus Terpadu berbasis Lanskap			
		7. Bank Indonesia, Kementerian Kominfo RI, Bappeda Sleman, Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman, Bank BRI	fasilitasi dalam operasionalisasi pasar lelang cabai dan sayuran secara online di Kabupaten Sleman			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		8. BMKG	informasi prakiraan cuaca dan iklim, informasi ini sangat penting dalam rangka menyusun antisipasi terhadap serangan OPT maupun terjadinya banjir/kekeringan. BMKG juga memberikan dukungan melalui kegiatan Sekolah Lapangan Perubahan Iklim bagi para petani			
		9. TNI dan POLRI	mitra kerja dan bersinergi mendukung ketahanan pangan dengan turut serta mengawal pengamanan produksi pertanian diantaranya pengamanan dari gangguan OPT			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		10. BPS DIY, BPS Kabupaten/Kota se-DIY	penyedia data statistik pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)			
		11. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten/Kota se-DIY	mitra kerja dalam pembinaan, pendampingan dan fasilitasi bagi poktan/KWT/gapoktan di wilayah masing-masing, penyedia data statistik pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		<p><u>C. DUNIA USAHA:</u></p> <p>1. Produsen sarana dan prasarana pertanian</p>	<p>menyediakan bahan-bahan (benih/bibit, pupuk, pakan, bahan pengendali OPT, obat hewan, alat mesin pertanian, alat/mesin pengolahan, dan sarana produksi lainnya) yang akan disalurkan sebagai fasilitas kepada poktan/KWT/gapoktan</p>			
		<p><u>D. PT:</u></p> <p>1. PT. Jasindo</p>	<p>penyelenggaraan asuransi tani (AUTP dan AUTS)</p>			
		<p>2. PT. Pupuk Indonesia</p>	<p>berkoordinasi dengan Bidang Tanaman Pangan untuk pelaporan pendistribusian pupuk subsidi di kios-kios pupuk di DIY</p>			
		<p>3. Bank Pemerintah yang tergabung dalam HIMBARA</p>	<p>penyedia jasa Kredit Usaha Rakyat (KUR)</p>			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		4. BRI	bersama dengan Bidang Tanaman Pangan melakukan pengawalan terhadap penggunaan Kartu Tani untuk menebus pupuk bersubsidi			
		5. BPD DIY	bersama dengan Bidang Hortikultura melaksanakan fasilitasi gudang benih bawang merah dan demplot benih bawang merah guna mencapai mandiri benih bawang merah di Kabupaten Bantul			
		<u>E. AKADEMISI:</u> 1. Beberapa Universitas Negeri dan Swasta di DIY yang memiliki Fakultas Pertanian, Teknologi Pertanian, dan/atau Peternakan	diseminasi teknologi dan pemberdayaan poktan/KWT/gapoktan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		<u>F. MASYARAKAT:</u>				
		1. Tim Penggerak PKK DIY	peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan pekarangan keluarga			
		2. Poktan, Gapoktan, dan P3A di wilayah DIY	mitra pengolahan produk pertanian			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY di antaranya:
 - a. Urusan Pertanian
 - Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dengan terbitnya Permentan tersebut, sejak bulan Juli pemerintah membatasi jenis pupuk subsidi yang sebelumnya lima jenis yakni ZA, Urea, NPK, SP-36, dan pupuk organik Petroganik menjadi dua jenis yaitu Urea dan NPK. Selain itu, pupuk subsidi yang sebelumnya menysasar 70 komoditas pertanian, tahun 2023 menyisakan 9 komoditas utama saja yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Dengan adanya kebijakan tersebut, petani yang selama ini masih cukup banyak bergantung pada pupuk subsidi akan mengalami kesulitan mendapatkan salah satu input utama dalam usaha budidaya pertaniannya.
 - Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mewabah di DIY sejak awal Mei 2022 masih perlu mendapatkan penanganan yang cukup serius dalam pengendaliannya. Ancaman penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) yang mulai menyerang sebagian wilayah DIY juga harus mendapatkan penanganan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak.
 - b. Urusan Pangan
 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) DIY telah menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat DIY saat ini sudah baik, namun konsumsi energi belum seimbang antar 9 (sembilan) kelompok bahan pangan.

- Adanya potensi cemaran kimia untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang berasal dari luar DIY.
 - Belum adanya izin edar berupa PD/PDUK untuk PSAT yang beredar di pasar tradisional.
2. Adapun yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu:
- a. Urusan Pertanian
 - Mendorong para petani untuk beralih menggunakan pupuk organik, fasilitasi bantuan pupuk organik, dan pengembangan/pengolahan pupuk organik secara mandiri.
 - Melaksanakan pencegahan dan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Untuk PMK dengan melaksanakan peningkatan biosekuriti, vaksinasi, penandaan dan pendataan ternak sedangkan untuk LSD dengan melaksanakan sosialisasi serta berbagai tindakan pencegahan melalui peningkatan biosekuriti, pengendalian vektor, peningkatan pengawasan lalu lintas ternak, dan vaksinasi.
 - b. Urusan Pangan
 - Promosi dan kampanye intensif pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media untuk mendorong masyarakat menerapkan pola konsumsi yang seimbang antar kelompok bahan pangan dengan cara menurunkan konsumsi padi-padian, protein hewani, minyak dan lemak, maupun gula serta meningkatkan konsumsi umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.
 - Berkoordinasi dengan OKKP-Pusat dan OKKP provinsi lain agar menghimbau para pelaku usaha mendaftarkan izin edar PSAT sehingga peredaran PSAT antar wilayah aman dikonsumsi oleh masyarakat luas.
 - Menghimbau dan memberikan sosialisasi intensif kepada pelaku usaha di pasar tradisional untuk dapat memasarkan PSAT yang memenuhi persyaratan izin edar.

3. Rencana tindak lanjut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY ke depannya yaitu:
- a. Urusan Pertanian
 - Meningkatkan fasilitasi bantuan pupuk organik serta pengembangan/pengolahan pupuk organik dan penerapan pertanian *zero waste* dengan memanfaatkan limbah peternakan untuk dijadikan pupuk organik secara mandiri.
 - Melaksanakan pencegahan dan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan para pihak terkait.
 - b. Urusan Pangan
 - Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan promosi B2SA melalui berbagai media secara berkelanjutan.
 - Meningkatkan pengawasan peredaran PSAT di wilayah DIY, dan apabila ditemukan PSAT dari luar DIY yang tidak aman akan segera disampaikan ke pemerintah daerah asalnya (melalui OKKP-D setempat) untuk dilakukan penelusuran dan pembinaan lebih lanjut.
 - Melakukan pendekatan kepada OPD yang berwenang dalam pengelolaan pasar tradisional untuk membantu upaya meningkatkan kesadaran pedagang dalam menjual PSAT yang memiliki izin edar maupun kemungkinan menginisiasi inovasi kebijakan baru dalam penerapan pemberlakuan izin edar PSAT di pasar tradisional.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Tumbuhnya perekonomian sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di DIY (Indikator: persentase peningkatan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB dari tahun 2017 ke tahun 2022 sebesar 6,15%)	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	N/A	7.112.249	7.183.372	7.255.205	7.327.757
2	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	N/A	90,22	90,52	90,82	91,12
3	(Indikator: persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan dari tahun 2017 ke tahun 2022 sebesar 2,96%)	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	N/A	40,29	39,74	39,19	38,65

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Sumber BPS)	Juta rupiah	7.327.757	Triwulan I	7.327.757
					Triwulan II	7.327.757
					Triwulan III	7.327.757
					Triwulan IV	7.327.757 *)
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,12	Triwulan I	91,12
					Triwulan II	91,12
					Triwulan III	91,12
					Triwulan IV	91,12
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	Persen	38,65	Triwulan I	40,83
					Triwulan II	40,83
					Triwulan III	40,83
					Triwulan IV	38,65 *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (APBD, DID)	Rp. 1.431.755.500
		Program Pengawasan Keamanan Pangan (APBD)	Rp. 142.327.250
2.	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan (APBD)	Rp. 95.892.000
3.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (APBD, DBH CHT, DID)	Rp. 30.196.870.750
4.	Program Peningkatan Populasi Peternakan		
5.	Peningkatan Produksi Perkebunan		
6.	Program Pengembangan Perbenihan Pertanian		
7.	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian		
8.	Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan		

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Pemendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
9.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (APBD, DBH CHT)	Rp. 5.258.126.064
10.	Program Peningkatan Produksi Hortikultura		
11.	Peningkatan Produksi Perkebunan		
12.	Program Peningkatan Populasi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (APBD, DID)	Rp. 2.541.414.427
13.	Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan		
14.	Program Perlindungan Tanaman Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (APBD)	Rp. 65.500.000
15.	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	Program Penyuluhan Pertanian (APBD)	Rp. 3.556.834.000
16.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD, DID)	Rp. 54.677.526.506
17.	Program Administrasi Perkantoran		
18.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Pemendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
19.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Jumlah Anggaran		Rp. 97.966.246.497

2. *) Data capaian kinerja bersumber dari BPS, Angka Sementara baru dirilis bulan Februari atau Maret tahun berikutnya sehingga capaian akhir tahun menggunakan Angka Prediksi OPD.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan:
 - a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman Rp. 4.894.144.200.
 - b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Rp. 859.704.000.
4. Mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp. 633.334.814 melalui:
 - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp. 331.756.814
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Rp. 301.578.000
5. Mengelola Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 2.702.944.177 melalui:
 - a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Rp. 167.298.000
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Rp. 248.171.700

- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura Rp. 233.756.000
 - d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan Rp. 14.757.000
 - e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Rp. 6.515.100
 - f. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Kewenangan Provinsi Rp. 368.263.950
 - g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 336.030.000
 - h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp. 1.312.952.427
 - i. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Rp. 15.200.000
6. Mengelola anggaran APBN Dekonsentrasi sebesar Rp. 11.352.661.000 melalui program:
- a. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - c. Program Dukungan Manajemen
 - d. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
7. Mengelola anggaran APBN Tugas Pembantuan sebesar Rp. 61.530.979.000 melalui program:
- a. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - c. Program Dukungan Manajemen

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
 KETAHANAN PANGAN DIY



Ir. SUGENG PURWANTO, M.M.A.
 NIP. 19650525 199103 1 017

- 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi;
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi;
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi;
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (*IKU*)
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY memperoleh katagori A, nilai sebesar 86,18% dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel;
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,91 atau 89,70% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,08 atau 88,33% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,94 atau 86,25% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 16,25 atau 81,25% dari bobot sebesar 20%.
5. Pengukuran kinerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 menggunakan pengukuran kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY beserta seluruh jajarannya agar bisa mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik, namun demikian masih ada tindakan perbaikan yaitu pada pencapaian sasaran/kinerja organisasi terutama pada kinerja yang dilaporkan (*output*).

Demikian ...



Demikian laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem AKIP Tahun 2021 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**